

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo**

###### **a. Keadaan Geografis**

Kecamatan Kanigaran adalah salah satu dari lima kecamatan yang ada di Kota Probolinggo dengan letak geografis Pada  $7^{\circ} 46'02''$  Lintang Selatan dan  $113^{\circ} 12'39''$  Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo terurai sebagai berikut :

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Kecamatan Mayangan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Kedupok
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Dringu
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kademangan

Kecamatan dengan luas  $10,65 \text{ km}^2$  ini terbagi menjadi 6 kelurahan. Luas wilayah kelurahan yang terkecil adalah Kelurahan Sukoharjo yaitu  $0,94 \text{ km}^2$  atau 8,86 persen wilayah kecamatan sedangkan untuk luas wilayah Kelurahan yang terbesar adalah Kelurahan Kanigaran dengan luas  $3,43 \text{ km}^2$  atau 32,17 persen wilayah kecamatan. Pusat pemerintahan Kecamatan Kanigaran berada di Kelurahan

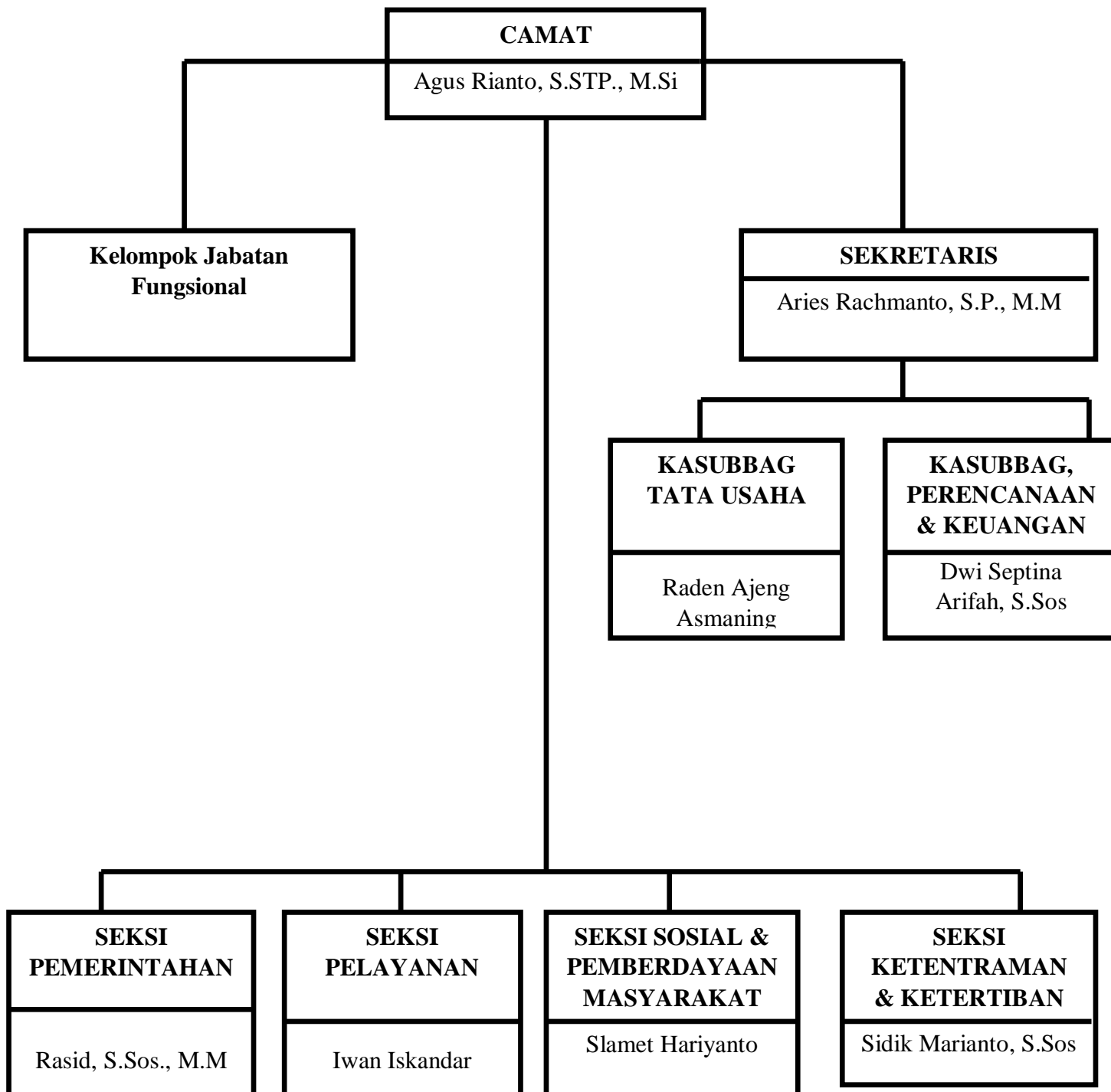
Kanigaran, secara keseluruhan jarak tempuh kelurahan ke ibu kota kecamatan serta luas wilayah masing-masing kelurahan.

Penduduk Kecamatan Kanigaran sebanyak 61.026 jiwa. Kepadatan penduduk terbesar berada di Kelurahan Kebonsari Kulon, yaitu sebesar 9.936 jiwa, sedangkan yang terendah berada di Kelurahan Tisnonegaran sebesar 2.562 jiwa. Jumlah tempat peribadatan di Kecamatan Kanigaran yang tercatat oleh Kementerian Agama Kota Probolinggo adalah 22 Masjid, 97 Musholla/Langgar, 7 gereja protestan, dan 1 gereja katolik (*Kecamatan Kanigaran Dalam Angka 2021*, t.t.)

b. Pemerintahan

Pada sistem pemerintahan Kecamatan Kanigaran dipimpin oleh seorang Camat yang merupakan bagian dari unsur Perangkat Daerah Kota Probolinggo yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Probolinggo. Dalam pelaksanaannya, kegiatan administrasi Kecamatan Kanigaran dibantu oleh 51 Rukun Warga (RW) dan 260 Rukun Tetangga (RT). Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di lingkungan pemerintah Kecamatan Kanigaran sebanyak 77 orang, yang terdiri dari 54 PNS di kantor kelurahan dan 23 PNS di kantor Kecamatan (<https://kecamatan.kanigaran.probolinggokota.go.id/>. (t.t.)

### Struktur Jabatan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo



Sumber:Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, 2022

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan mewujudkan visi misi Walikota Probolinggo periode 2018-2023, maka Kecamatan Kanigaran menyusun visi-misi sebagai berikut :

### **VISI**

“ MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN DAN BERKELANJUTAN ”

### **MISI**

1. TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK : Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN yang berkualitas dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik ditingkat Kecamatan dan Kelurahan;
2. SUMBERDAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKUALITAS : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, baik individu maupun kelompok dan lembaga masyarakat mulai dari tingkat Kelurahan/Desa.

(*Profil-Kecamatan*(t.t.).<https://keckanigaran.probolinggokota.go.id/Visi-Misi/>)

## **2. Kelurahan Kebonsari Wetan Kota Probolinggo**

Kelurahan Kebonsari Wetan merupakan salah satu dari wilayah kekuasaan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, yang dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Lurah yang berada di bawah dan tanggung jawab Camat Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo (*KELURAHAN KEBONSARI WETAN*, t.t.) Adapun visi dan misi dari Kelurahan Kebonsari Wetan sebagai berikut:

## **VISI**

“MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA  
PROBOLINGGO LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA,  
TRANSPARAN, AMAN DAN BERKELANJUTAN”

## **MISI**

1. Meningkatkan kualitas pegawai yang profesionalitas dalam segala hal pelayanan, ramah dan berdisiplin tinggi.
2. Menerapkan proses pelayanan yang efektif, efisien dan transparan untuk mencapai hasil yang maksimal.

### 1. Bidang Pemerintahan

#### a. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Kelurahan Kebonsari Kulon / Kelurahan Sukoharjo
- Sebelah Selatan : Kelurahan Jrebeng Lor
- Sebelah Barat : Kelurahan Jrebeng Lor / Kelurahan Kebonsari Kulon
- Sebelah Timur : Kelurahan Sumber Taman / Kelurahan Sukoharjo

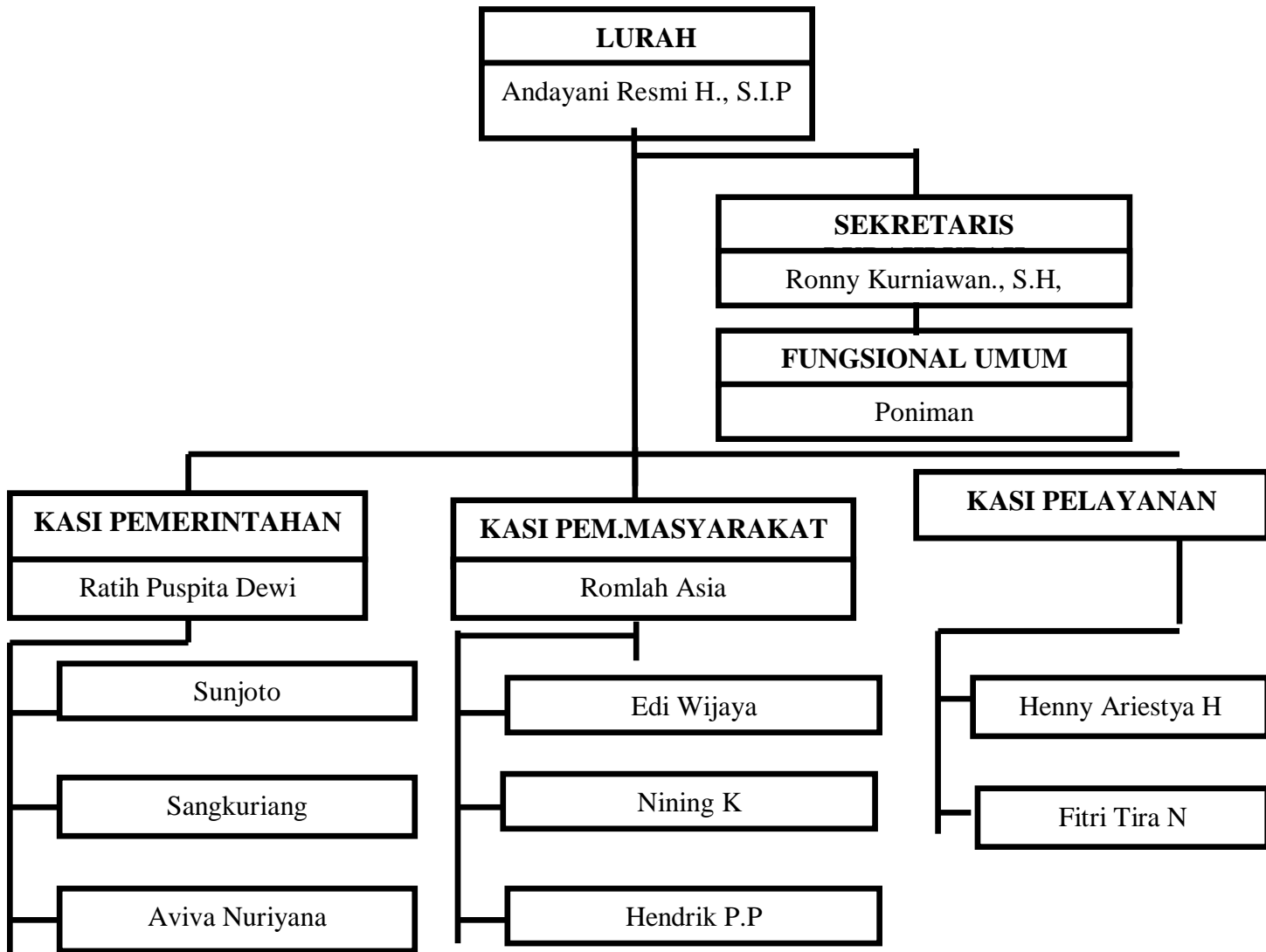
#### a. Sumber Daya Organisasi Kelurahan

- Jumlah ASN (Total) : 12 orang
- Status ASN : 9 orang PNS dan 3 orang Magang
- Tingkat Pendidikan ASN :
  - Sarjana (D4/S1, S2, S3) : 5 orang
  - Lulusan SMA : 7 orang

## 2. Kependudukan

Penduduk merupakan bagian dari subjek dan objek dalam pembangunan, hal ini dikatakan sebab pembangunan dilaksanakan oleh penduduk untuk tujuan mensejahterakan penduduk itu sendiri. Berikut gambaran umum mengenai kependudukan di Kelurahan Kebonsari Wetan. Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun di Kelurahan Kebonsari Wetan sebesar 2,45% dengan populasi penduduk mencapai 6.155 jiwa. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin mayoritas adalah laki-laki dengan jumlah 3.101 orang dan perempuan 3.054 orang. Penduduk Kelurahan Kebonsari Wetan mayoritas adalah bermata pencaharian sebagai karyawan swasta sebanyak 1093 orang, Wiraswasta 466 orang, PNS / TNI 121 orang, Petani 14 orang, Pertukangan 22 orang, Buruh, Tani 33 orang dan Pelayanan Jasa 8 orang. Mayoritas penduduk beragama Islam dengan jumlah populasi 6.149 Orang. Dalam aspek pendidikan lulusan umum mayoritas adalah lulusan SMA sebanyak 1.648 orang dan SD sebanyak 1.493 orang. Dalam pelayanan kesehatan, kelurahan Kebonsari Wetan memiliki puskesmas pembantu 1 buah dengan jumlah posyandu 2 buah. (*Kecamatan Kanigaran Dalam Angka 2021, t.t.*)

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN  
KELURAHAN KEBONSARI WETAN - KECAMATAN KANIGARAN  
KOTA PROBOLINGGO**



*Sumber: Kelurahan Kebonsari Wetan, 2022*

### **3. LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) MANDALA Kelurahan Kebonsari Wetan**

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) merupakan paguyuban yang berada di tengah masyarakat pada tingkat desa atau kelurahan yang kedudukannya sebagai pimpinan kolektif dalam wadah berkumpulnya individu berjiwa relawan, bijak, transparan, akuntabel, amanah dalam mengkoordinir penanganan masalah kekumuhan serta memiliki rasa empati tinggi terhadap warga yang berada pada perekonomian tingkat menengah ke bawah atau biasa disebut masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa LKM yaitu suatu himpunan masyarakat berbentuk lembaga pimpinan kolektif yang memiliki peran sebagai dewan pengambilan keputusan dimana pada proses pengambilan keputusan dilaksanakan secara partisipatif di tingkat kelurahan atau desa. (*M. ADRIANSYAH, 2018 - Copy.pdf, t.t.*)

#### **a. Sejarah Terbentuknya LKM MANDALA**

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) “MANDALA” Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo terbentuk pada tanggal 22 Oktober 2009 melalui rapat pada tingkat kelurahan. Nama “Mandala” kepanjangan dari “Maju tanpa kendala” artinya diharapkan LKM dapat mengatasi permasalahan yang muncul di kemudian hari dilingkungan wilayah kelurahan kebonsari wetan. Lokasi kantor kesekretariatan LKM Mandala beralamat di jl.Sunan Muria No.46 Kelurahan kebonsari wetan kecamatan kanigaran.



Struktur organisasi pemimpin terpilih dengan jumlah 6 orang laki-laki dan 3 orang perempuan orang yang terdiri atas dari berbagai profesi dan latar belakang guru, PNS, dan ibu rumah tangga. Pemilihan anggota dilakukan dari tingkat RT hingga kelurahan secara demokratis. Setiap menjalankan fungsi dan tugasnya LKM Mandala selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat selain itu dalam mengelola pembukuan sekretariat serta UPK selalu dilakukan dengan tanggung jawab sesuai kegiatan dan dibukukan dengan benar. Hal tersebut tidak terlepas dari kinerja LKM yang menyeleksi dan menata pengurus yang sesuai dengan kriteria kemampuannya masing-masing (Probolinggo, [bkmprobolinggo.blogspot.com](http://bkmprobolinggo.blogspot.com))

#### b. Visi dan Misi LKM MANDALA

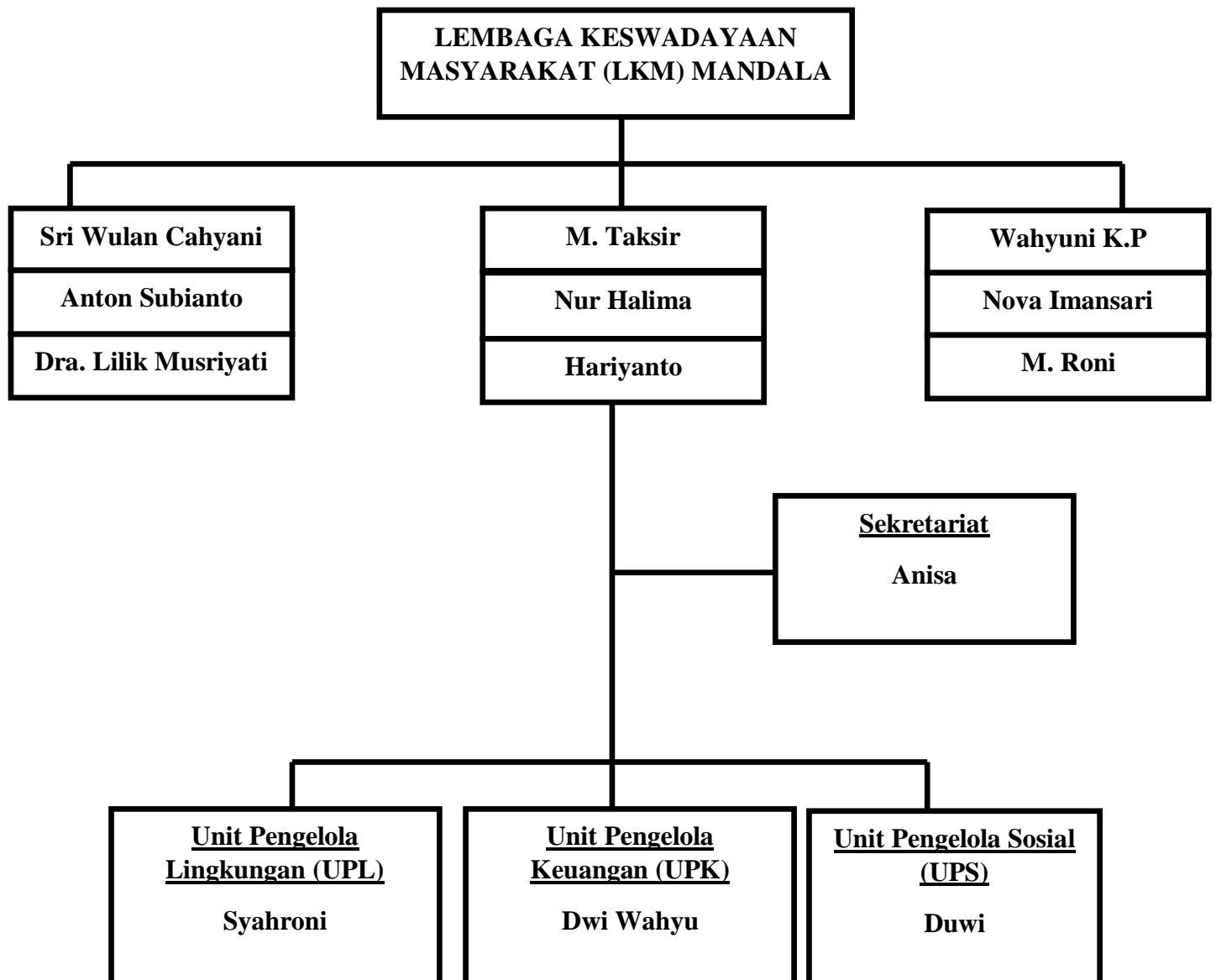
Penetapan visi dan misi merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan dan dilaksanakan guna mewujudkan tugas dan tujuannya. Adapun visi dan misi LKM MANDALA sebagai berikut:

**VISI** :Terwujudnya masyarakat kebonsari wetan yang sejahtera. Mandiri dan berkeadilan serta hidup dalam lingkungan yang sehat.

**MISI** :

1. Membangun masyarakat mandiri yang mampu menjalin kebersamaan dan kepedulian dalam menanggulangi kemiskinan dengan memaksimalkan potensi lokal
2. Mampu meningkatkan fasilitas sarana prasarana masyarakat.

- c. Struktur Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) MANDALA Tahun 2022-2024 Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo



Sumber: Kantor LKM MANDALA Kelurahan Kebonsari Wetan, 2022

## **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan pembahasan hasil penelitian dengan didasari data yang penulis peroleh selama di lapangan melalui observasi, wawancara, telaah dokumentasi serta studi kepustakaan mengenai Efektivitas Program *Cash For Work* (CFW) Dalam Kegiatan Infrastruktur Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Mitigasi Pandemi *COVID-19* (Studi Pada Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo) yang akan disajikan dengan teknik kualitatif deskriptif dengan tetap mengacu pada interpretasi data. Dari data yang diperoleh dari kegiatan wawancara dengan pihak penyelenggara atau pelaksana dan pihak pengawas program *cash for work* (CFW) di Kelurahan Kebonsari Wetan yang menjadi subyek dan obyek dalam mencari data. Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis data yang disesuaikan dengan teori efektivitas melalui beberapa indikator yang dijadikan bahan analisis oleh penulis sehingga dapat disajikan secara sistematis dalam menganalisis data.

### **1. Efektivitas Program *Cash For Work* (CFW) Dalam Kegiatan Infrastruktur Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Mitigasi Pandemi *COVID-19* Di Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo**

Dalam melaksanakan suatu program, penilaian efektivitas merupakan suatu hal yang begitu penting dilakukan guna memperoleh hasil dan informasi mengenai realisasi suatu program baik dari segi sejauh mana implikasi atau manfaat yang dihasilkan oleh program yang telah

dilaksanakan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program berikutnya baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Dalam menjalankan kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu program *cash for work*, penulis meninjau efektivitas dalam kaca mata teori yang dikemukakan oleh Sutrisno (dalam Wulandari 2018:16) yang menyatakan bahwa untuk mengetahui sejauh mana keefektifan suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan 5 variabel. Variabel yang dijadikan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini antara lain:

- a) Pemahaman Program,
- b) Ketepatan Sasaran
- c) Ketepatan Waktu
- d) Tercapainya Tujuan
- e) Perubahan Nyata.

Adapun hasil wawancara dan observasi di lapangan dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **a. Pemahaman Program**

Pemahaman program merupakan ukuran penting untuk mengetahui efektif tidaknya suatu program yang dijalankan. Bagaimana sebelum dan ketika pelaksanaan program yang akan direalisasikan dengan mudah dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Aspek pemahaman program biasanya mencakup kegiatan komunikasi yaitu sosialisasi program. Pada pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan pemberian pemahaman

program bukan saja melalui proses sosialisasi saja, namun juga melalui pembekalan teknis oleh kelurahan dan LKM Mandala mengingat program ini adalah program kegiatan infrastruktur ringan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Ronny Kurniawan., S.H, M.AP selaku Sekretaris Lurah Kebonsari Wetan, beliau mengatakan:

“Memberikan pemahamannya sebelum program ini direalisasikan lewat kegiatan sosialisasi mengenai program CFW karena program ini merupakan program pertama kali yang dilaksanakan di Kelurahan Kebonsari Wetan dan yang paling penting adalah melihat respon masyarakat terhadap program CFW dan memberikan informasi kepada masyarakat khususnya kepada para calon pekerja yang nantinya ada di lapangan. Kedua, memberikan pembekalan teknis melalui pelatihan pertukangan kepada masyarakat yang menjadi pekerja dalam perbaikan infrastruktur. Untuk pelaksanaannya kan hanya merehab bangunan dari program KOTAKU jika ada kerusakan atau penurunan kualitasnya bukan membangun jadi ini menurut saya pelaksanaannya mudah dikerjakan.” (Wawancara dengan Ronny Kurniawan., S.H, M.AP pada Jumat, 11 Februari 2022 pukul 09.15 WIB).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawali selaku masyarakat penerima program CFW menyatakan bahwa:

“Iya, memang ada sosialisasi menurut saya penyampaian materi dalam sosialisasi ini mudah dipahami oleh masyarakat dijelaskan juga secara lengkap mengenai proses pelaksanaan, upah yang diberikan, kegiatannya apa saja semua disampaikan ketika sosialisasi. Kalau pelaksanaannya mudah dikerjakan karena hanya memperbaiki titik-titik yang menjadi target perbaikan, bukan membangun dari awal.” (Wawancara dengan Achmad Sawali pada hari Rabu, 9 Maret 2022 pukul 09.00 WIB).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya sebelum pelaksanaan di lapangan pihak kelurahan melalui LKM Mandala memberikan pemahaman lewat sosialisasi dan pelatihan pertukangan program *cash for work* yang dilakukan secara tatap muka di kantor Kelurahan Kebonsari Wetan. Pembekalan teknis kepada pekerja melalui serangkaian pelatihan pertukangan,

dan pelatihan KPP (Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan) dengan tujuan dapat menghasilkan pencapaian program yang optimal. Selain itu dalam pelaksanaannya adalah merehabilitasi atau memperbaiki infrastruktur bukan membangun infrastruktur baru sehingga pelaksanaannya dirasa memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Hasil wawancara selanjutnya mengenai indikator pemahaman program menyatakan bahwa aktor pelaksana yakni kelurahan Kebonsari Wetan beserta LKM Mandala sebagai mitra pengelola program CFW dan masyarakat sebagai pelaksana dalam program CFW telah memahami program *cash for work* dan ada pendampingan dalam setiap pelaksanaan kegiatan program, Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Wulan selaku Ketua LKM Mandala, beliau menyatakan:

“Semua pelaksana disini saya rasa sudah paham tentang pelaksanaan program CFW ini termasuk masyarakatnya. Karena kami sudah melaksanakan sesuai dengan buku POS PUPR yang memang di dalamnya terdapat petunjuk mengenai pelaksanaan kegiatan CFW dan untuk setiap pelaksanaan proses mulai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kami selalu melibatkan masyarakat. Memang kelihatannya ini hanya perbaikan tapi pendampingan harus tetap dilakukan segala kegiatan mulai dari perencanaan hingga anggaran yang dikeluarkan itu sudah ada rinciannya semua.” (Wawancara dengan Sri Wulan Cahyani pada Selasa, 22 Februari 2022 pukul 11.00 WIB).

Pernyataan yang sama juga dinyatakan Bapak Sunari selaku masyarakat penerima program CFW, menyatakan bahwa:

“Menurut saya untuk pekerjaannya mungkin sudah paham dengan apa yang harus mereka kerjakan, kalau dari LKM Mandala saya rasa sudah memahami karena yang mengelola LKM. dilihat dari penyampaian materi yang dijelaskan ketika sosialisasi. Benar ada pendampingan, yang sering mendampingi itu dari tim pelaksana.” (Wawancara dengan Sunari Abdul Gofur pada Selasa, 15 Maret 2022 pukul 09.30 WIB).

Dari wawancara diatas aktor pelaksana baik dari masyarakat maupun pemerintah telah memahami program *cash for work* yang dapat dilihat dari mulai proses sosialisasi hingga pemberian pelatihan pertukangan kepada masyarakat yang pada pelaksanaannya sudah berpedoman pada POS Kegiatan *Cash For Work* (CFW) Tahun 2021 dari Kementerian PUPR. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan perbaikan infrastruktur di lapangan dilakukan pendampingan dari tim pelaksana program untuk menanggapi terjadinya permasalahan pada pelaksanaan perbaikan infrastruktur.

Bentuk mitigasi yang dilakukan melalui program *cash for work* (CFW) yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo apabila dilihat dari prinsip-prinsip mitigasi bencana yang dikemukakan oleh Harjadi dkk, (2007) dimana pelaksanaan mitigasi baik untuk bencana alam maupun non-alam harus memenuhi beberapa prinsip mitigasi yakni diantaranya, upaya mitigasi bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak, prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan, serta dibutuhkan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan pada keterkaitan antara pemahaman program dengan prinsip-prinsip diatas maka didapat hasil sebagai berikut:

- 1) Prinsip Upaya mitigasi bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak.

Prinsip utama yang harus dijadikan acuan dalam upaya mitigasi pada suatu bencana adalah bahwa mitigasi haruslah bersifat kompleks

dan melibatkan banyak pihak. Bersifat kompleks yang dimaksud dalam hal ini adalah mengintegrasikan mitigasi melalui program-program pembangunan maupun perbaikan dalam infrastruktur yang mana pemilihan upaya mitigasi harus didasarkan atas biaya dan manfaat yang tepat untuk menghindari kegagalan pada setiap upaya mitigasi bencana. Upaya mitigasi juga harus dimulai dari yang mudah dilaksanakan. Pihak yang terlibat haruslah bekerjasama dengan beberapa pihak terkait. (Harjadi dkk, (2007))

Keterkaitan antara pemahaman program dengan prinsip pertama ini bahwa masyarakat sebagai pekerja dalam program CFW yang dilaksanakan di Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo baik dari segi aktor pelaksana dan penyelenggara telah memahami maksud dan tujuan dari program serta cara pelaksanaannya. Sebelum dilaksanakannya upaya mitigasi ini dilakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pertukangan. Hal ini tentu sesuai dengan prinsip mitigasi yang bersifat sangat kompleks dan melibatkan pihak baik swasta, pemerintah dan lapisan masyarakat lokal wilayah Kelurahan Kebonsari Wetan.

Hal itu dibuktikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Ronny Kurniawan., S.H, M.AP selaku Sekretaris Lurah Kebonsari Wetan sebagai berikut:

“Yang saya tahu mitigasi itu adalah pengurangan dampak resiko dari adanya suatu bencana. Upaya mitigasi *covid-19* dalam sektor ketenagakerjaan ini saya rasa tepat sekali disituasi banyaknya masyarakat yang ter-PHK. Program CFW ini adalah salah satu



upaya dari pemerintah yang kegiatannya adalah lebih kepada infrastruktur yakni perbaikan jadi dirasa memberi kemudahan kepada pekerja.” (Wawancara dengan Ronny Kurniawan., S.H, M.AP pada Jumat, 11 Februari 2022 pukul 09.15 WIB).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan yakni

Ibu Wulan selaku Ketua LKM Mandala, beliau menyatakan:

“Program CFW ini upaya mitigasi yang pertama kali dilaksanakn selama pandemi *covid-19* dan juga pertama kali dilaksanakan di Kelurahan Kebonsari Wetan. Jadi cara kelurahan dan LKM Mandala memberikan pengetahuan dan informasi melalu sosialisasi dan pelatihan pertukangan kepada mereka yang terpilih sebagai pekerja dalam program CFW selama 50 hari kedepan.Kami melibatkan masyarakat MBR,toko supliyer bahan bangunan dan pemerintah dalam pelaksanaannya. Bisa di nilai sesuai dengan prinsip yang mbak jelaskan tadi.” (Wawancara dengan Sri Wulan Cahyani pada Selasa, 22 Februari 2022 pukul 11.00 WIB).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawali

selaku masyarakat penerima program CFW yang menyatakan bahwa:

“Pekerja dalam perbaikannya sudah paham menurut saya dan proyek yang dikerjakan juga mudah karena sebelumnya ada pelatihan, pelatihannya melalui materi. Kami juga diajarkan mulai dari proses persiapan samapi pelaksanaan yang mengurus adalah kami sebagai pekerja dengan bantuan LKM.” (Wawancara dengan Achmad Sawali pada hari Rabu, 9 Maret 2022 pukul 09.00 WIB).

Dari keseluruhan wawancara diatas dapat disimpulkan yakni dalam upaya memberikan pemahaman program kepada pekerja dalam program CFW di Kelurahan Kebonsari Wetan yakni melalui proses sosialisasi dan pelatihan pertukangan dan pihak yang terlibat sudah melibatkan pihak swasta dalam bekerjasama yakni toko supliyer bahan bangunan selain dari masyarakat dan pemerintah sebagai penyelenggara. Hal ini sesuai dengan prinsip upaya mitigasi yang berifat kompleks dan melibatkan berbagai pihak.

2) Prinsip Prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan

Dalam setiap mitigasi bencana kelompok rentan yakni korban adalah sasaran paling utama dalam setiap mitigasi. Kelompok rentan dalam bencana non-alam ini adalah mereka yang terdampak *covid-19* dalam pekerjaannya terkhusus adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah sasaran. (Harjadi dkk, (2007))

Dilihat berdasarkan indikator pemahaman program dengan prinsip mitigasi kedua ini terdapat hubungan yang bisa dikatakan bahwa pemahaman mengenai adanya program harus dapat memprioritaskan masyarakat yang menjadi sasaran dari program CFW sendiri. Untuk mendapatkan kesesuaian penilaian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Wulan selaku Ketua LKM Mandala sebagai berikut:

“Latar belakang dari munculnya program ini kan karena banyaknya pengangguran akibat PHK tentu upaya mitigasi pada program CFW ini adalah kelompok masyarakat yang terdampak *covid-19*. Mereka kan rentan akan tidak adanya pendapatan.”(Wawancara dengan Sri Wulan Cahyani pada Selasa, 22 Februari 2022 pukul 11.00 WIB).

Selanjutnya melakukan wawancara dengan Bapak Purnomo selaku masyarakat penerima program CFW yang menyatakan bahwa:

“Iya mbak kalau untuk pekerjaannya memang masyarakat wilayah Kelurahan Kebonsari Wetan sebagai prioritas dan sasaran utamanya. Untuk pemahaman program yang jauh lebih tau kriteria penerima adalah LKM Mandala.” (Wawancara dengan Purnomo pada Selasa, 15 Maret 2022 pukul 09.30 WIB).

Dari keseluruhan hasil wawancara keterkaitan mengenai prinsip prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan dalam pemahaman program yakni agen penyelenggara memahamai akan kelompok rentan yang perlu

dirprioritaskan yakni masyarakat MBR di wilayah Kelurahan Kebonsari Wetan yang benar-benar terdampak *covid-19* dengan pendapatan keseharian bergantung pada hasil harian.

3) Prinsip Dibutuhkan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan.

Pada prinsip ini evaluasi dan pemantauan perlu dilakukan secara berskala serta terus-menerus dapat melalui tersedianya informasi mengenai hasil pelaksanaan dan mencakup semua langkah yang diambil untuk mengurangi skala bencana di masa mendatang, baik efek maupun kondisi rentan untuk mengetahui perubahan situasi (Harjadi dkk, (2007)). Dalam pelaksanaannya pada indikator pemahaman program bahwa pelaksanaan program CFW di Kelurahan Kebonsari Wetan dalam prinsip evaluasi belum dilakukan sepenuhnya baik oleh pemerintah pusat maupun Kelurahan dan LKM dan masyarakat. Hal ini dinyatakan oleh Ibu Wulan selaku Ketua LKM Mandala sebagai berikut:

“Didalam buku POS itu sudah dijelaskan bahwa memang perlu adanya evaluasi setelah program ini dilaksanakan. Untuk evaluasi kami tidak melakukan secara rutin, ketika ada masalah dilapangan dan ketika proyek sudah dikerjakan kami melakukan evaluasi antara LKM Mandala dan Kelurahan. Pemantauannya kami lakukan selama di lapangan, setelah proyek pengerjaan selesai belum ada jadwal khusus untuk evaluasi baik dari kelurahan maupun PUPR sendiri.” (Wawancara dengan Sri Wulan Cahyani pada Selasa, 22 Februari 2022 pukul 11.00 WIB).

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Sawali selaku masyarakat penerima program CFW beliau menyatakan bahwa:

“Pemahaman program dalam evaluasi ini sepertinya LKM yang banyak lebih tau kami sebagai pekerja hanya mengikuti perintah

dari LKM maupun Kelurahan, sementara ini evaluasi dilakukan ketika ada masalah saja ketika selama saya dilapangan yang saya tahu mbak.” (Wawancara dengan Achmad Sawali pada hari Rabu, 9 Maret 2022 pukul 09.00 WIB).

Dari keseluruhan hasil wawancara diatas mengenai pemahaman program terhadap prinsip mitigasi dibutuhkan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan dapat dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan selama ada kendala dan pemantauan dilakukan selama program ini dijalankan yang memang sesuai dengan aturan buku POS CFW yang didalamnya ada kegiatan evaluasi namun dalam secara berkelanjutan belum dilaksanakan sepenuhnya.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dan melihat dari pernyataan yang disampaikan oleh informan dapat disimpulkan bahwa cara pemerintah kelurahan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai program CFW di Kelurahan Kebonsari Wetan dengan melakukan komunikasi melalui sosialisasi dan pembekalan teknis dengan serangkaian pelatihan pertukangan yang pelaksanaannya terlaksana dengan baik dan optimal. Semua pihak yang terlibat telah memahami program mulai dari perencanaan hingga realisasi program yang berpedoman pada POS penyelenggaraan CFW sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat yang kegiatannya adalah memperbaiki atau pemeliharaan aset infrastruktur. Jika di dasarkan pada prinsip mitigasi maka dalam indikator pemahaman program telah memenuhi ke tiga prinsip mitigasi yang sesuai dengan pendapat Harjadi,dkk (2007) yakni upaya mitigasi bersifat sangat kompleks yang pada prinsip ini telah memenuhi bahwa program pembangunan maupun perbaikan dalam infrastruktur merupakan salah satu upaya mitigasi pemerintah pada

bencana non-alam yang keterlibatannya bukan saja masyarakat dengan pemerintah namun juga dengan pihak swasta yakni toko supliyer bahan material bangunan. Prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan bahwa agen penyelenggara LKM Mandala telah memahami bahwa kelompok rentan yang perlu di priortaskan adalah masyarakat MBR yang termapak *covid-19*. Prinsip dibutuhkan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan yang dalam indikator pemahaman program belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip mitigasi dimana sudah sesuai dengan buku pedoman POS CFW dari Kementerian PUPR namun secara berkelanjutan setelah program direalisasikan belum dilaksanakan.

#### **b. Ketepatan Sasaran**

Tepat sasaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dimana pelaksanaan program yang dijalankan memiliki skala prioritas terhadap kebutuhan masyarakat. Kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan sudah tepat sasaran terhadap masyarakat penerima dan kebutuhan masyarakat yang sudah ditentukan oleh kriteria POS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam program *cash for work* dan pelaksanaan program sesuai kebutuhan masyarakat atau justru sebaliknya.

Berikut pemaparan hasil wawancara mengenai ketepatan sasaran yang mengungkapkan dalam penentuan tenaga kerja melakukan kegiatan administrasi untuk memastikan program tepat pada sasaran kelompok rentan

dan melakukan survey harga satuan bahan material untuk ketepatan dalam penentuan kebutuhan perbaikan dan finansial, Hal ini dinyatakan oleh Ibu Anisa selaku sekretaris LKM Mandala sebagai berikut:

“Menurut saya program ini saya rasa sudah tepat sasaran pada kelompok penerima program kami memprioritaskan masyarakat rentan yaitu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang termasuk kelompok rentan seperti supir, pak tukang, kuli pabrik. Sebelumnya kami mengajak masyarakat juga siapa saja boleh mendaftarkan diri dan memang sebelumnya sudah diberitahukan mengenai upah yang diberikan. Kalau berbicara tentang survey kami memang melakukan dua survey yaitu mengenai survey teknis untuk memastikan bahwa itu sudah sesuai kebutuhan perbaikan dan survey harga satuan bahan material. Surveynya di lakukan pada kurang lebih 5 toko bangunan. Dana bantuan dari pemerintah sebesar 300.000.000 sudah kami manfaatkan sesuai RAB, dan kami menghabiskan anggaran sebesar 296.526.000” (Wawancara dengan Ibu Anisa pada Selasa, 22 Februari 2022 pukul 12.00 WIB).

Untuk melihat kesesuaian dengan apa yang disampaikan informan, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Purnomo selaku masyarakat penerima program CFW mengungkapkan bahwa:

“Program CFW ini menurut saya sudah sesuai kriteria masyarakat walaupun mungkin ada masyarakat yang merasa dirinya membutuhkan program CFW ini namun ternyata LKM Mandala sendiri belum bisa merekrut sebaga calon tenaga kerja. Yang saya tahu LKM merekrut anggota KSM ini bagi masyarakat MBR, seperti saya contohnya.” (Wawancara dengan Guntur Purnomo pada Senin, 14 Maret 2022 pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwasanya dalam penyusunan tenaga kerja ada kegiatan administrasi dengan persyaratan pengumpulan KTP dan KK pada formulir pendaftaran yang dilakukan melalui ketua RT dengan penerima program yang diprioritaskan oleh LKM Mandala adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Anggaran dalam pelaksanaan program CFW berasal dari dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) dari

Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp. 300.000.000,-. Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan adalah sebesar Rp. 296.526.000,- dengan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat pada sub bidang perbaikan ringan infrastruktur dan pemberian upah untuk masyarakat penerima program. Upah yang di terima masyarakat penerima progam sebagai kepala tukang adalah Rp.85.000,- bagi pekerja sebesar Rp.70.000,-.

Hasil wawancara berikutnya mengungkapkan bahwa pelaksanaan program perbaikan telah mengedepankan prioritas yang dibutuhkan masyarakat, Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ronny Kurniawan., S.H, M.AP selaku Sekretaris Lurah Kebonsari Wetan sebagai berikut:

“Program ini kan memberdayakan masyarakat jadi sudah pasti harus mengedepankan kebutuhan masyarakat juga. Tempat-tempat yang dilaksanakan adalah tempat-tempat yang sudah direncanakan sesuai dengan perencanaan rehabilitasi pada kegiatan sosialisasi kemarin yang menghasilkan proyek perbaikan. Dalam pelaksanaan perbaikannya sudah sesuai aspirasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kalau dalam perencanaan kami melibatkan masyarakat tentang perbaikan yang akan dilaksanakan masih pada aset KOTAKU. Ada 14 lokasi yang menjadi target. (Wawancara dengan Ronny Kurniawan., S.H, M.AP pada Jumat, 11 Februari 2022 pukul 09.15 WIB).

Hal yang senada juga diungkapkan Bapak Sawali selaku masyarakat penerima program CFW, beliau menyatakan:

“Pelaksanaan perbaikan sudah sesuai hasil musyawarah bersama masyarakat, kami melaksanakan sesuai jadwal proyek perbaikan pada bangunan program KOTAKU.” (Wawancara dengan Achmad Sawali pada hari Rabu, 9 Maret 2022 pukul 09.00 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dinyatakan pelaksanaan kegiatan program CFW telah dilaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat dan mengedepankan prioritas masyarakat sesuai dengan hasil musyawarah dalam

perencanaan rehabilitasi infrastruktur. Terdapat 14 titik lokasi dengan berbagai macam perbaikan infrastruktur yang akan menjadi target perbaikan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan sesuai dengan hasil musyawarah dalam perencanaan rehabilitasi.

Apabila dilihat dari prinsip-prinsip mitigasi bencana yang dikemukakan oleh Harjadi dkk, (2007) pada pelaksanaan di Kelurahan Kebonsari Wetan dimana pelaksanaan mitigasi perlu terdapat tiga prinsip yang diterapkan yakni diantaranya, upaya mitigasi bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak, prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan, serta dibutuhkan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan pada keterkaitan antara ketepatan sasaran dengan prinsip-prinsip diatas maka didapat hasil sebagai berikut:

- 1) Prinsip Upaya mitigasi bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak.

Hubungan keterkaitan antara ketepatan sasaran dengan prinsip bahwa upaya mitigasi harus bersifat kompleks yaitu pemilihan upaya mitigasi yang dilaksanakan di Kelurahan Kebonsari Wetan sudah didasarkan pada biaya yang akan di keluarkan selama pelaksanaan program dengan membuat rancangan anggaran biaya (RAB) dalam proposal sebelum dana dari Kementerian PUPR dicairkan. Sedangkan pada pihak yang terlibat sudah dirasa sesuai prinsip dan tepat sesuai dengan kebutuhan bahwa yang terlibat adalah masyarakat MBR, pemerintah Kelurahan dan pihak swasta sebagai pemilik toko.



Hal itu dibuktikan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan

Ibu Anisa selaku sekretaris LKM Mandala sebagai berikut:

“Jadi sebelum program ini dilaksanakan anggota KSM ini membuat proposal untuk diverifikasi oleh pusat dan RAB yang akan di jadikan sebagai bahan ajuan dalam pencairan dana. Kami memperhitungkan anggaran biayanya bukan sembarangan, kami melakukan survey dulu terkait dengan harga bahan dan alat materialnya. Jadi biar bisa ada pandangan untuk tidak melebihi dari 300 juta dengan upah pekerja.” (Wawancara dengan Ibu Anisa pada Selasa, 22 Februari 2022 pukul 12.00 WIB).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sunari selaku masyarakat penerima program CFW beliau mengungkapkan:

“Dana terbatas hanya 300 juta sudah termasuk upah yang akan diberikan kepada pekerja, jadi LKM dan Kelurahan saling bekerjasama dengan toko bangunan supaya proyek infrastrukturnya tepat. Penentuan biaya itu didasakan pada hasil survey yang di masukkan pada proposal.”(Wawancara dengan Sunari Abdul Gofur pada Selasa, 15 Maret 2022 pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam indikator ketepatan sasaran jika dilihat berdasarkan prinsip mitigasi diatas bahwa pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan sudah tepat pada perhitungan anggaran biaya dengan melakukan survey dan melibatkan pihak pemilik toko dalam bekerjasama untuk membuat rancangan anggaran biaya tersebut.

## 2) Prinsip Prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan

Dilihat berdasarkan indikator ketepatan sasaran dengan prinsip mitigasi kedua ini terdapat hubungan yang bisa dinilai bahwa ketepatan sasaran penerima program perlu didasari pada prioritas utama yakni masyarakat MBR yang menitikberatkan masyarakat lokal sebagai pekerja dengan kriteria tertentu agar upaya mitigasi ini benar-

benar berhasil dan berdampak positif kepada masyarakat sasaran. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari oleh Bapak Ronny Kurniawan., S.H, M.AP selaku Sekretaris Lurah Kebonsari Wetan sebagai berikut:

“Program CFW ini adalah program pemberdayaan masyarakat yang lebih dikhususkan kepada masyarakat MBR. Masyarakat lokal di wilayah Kelurahan Kebonsari Wetan yang diprioritaskan sebagai penerima program. MBR sendiri termasuk dari kelompok rentan dalam situasi pandemi saat ini. LKM menyeleksi masyarakat pendaftar sesuai dengan kriteria dalam upaya mitigasi ini. Jika berbicara prinsip mitigasinya saya rasa sudah tepat karena kami mengambil dari kelompok rentan yang membutuhkan” (Wawancara dengan Ronny Kurniawan., S.H, M.AP pada Jumat, 11 Februari 2022 pukul 09.15 WIB).

Senada dengan pernyataan diatas, ungkapan yang sama juga dikatakan oleh Bapak Purnomo selaku masyarakat menyatakan:

“Kalau untuk tepat tidaknya saya rasa sudah tepat sasaran ya mbak, masyarakat kebanyakan yang ikut program ini memang masyarakat miskin yang terdampak *covid-19*.” (Wawancara dengan Guntur Purnomo pada Senin, 14 Maret 2022 pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan yakni keterkaitan antara ketepatan sasaran dengan prinsip mitigasi prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan yakni penerima program telah sesuai dengan prinsip mitigasi tersebut dimana kelompok rentan penerima program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang benar-benar mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja maupun yang dirumahkan dalam sementara waktu, hal tersebut sesuai dengan kriteria dari sasaran program *cash for work* tersebut.

3) Prinsip Dibutuhkan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya pada indikator ketepatan sasaran pada prinsip evaluasi dan pemantauan sudah dirasa menerapkan prinsip ini yang berdampak positif terhadap kegiatan pelaksanaan program CFW di Kelurahan Kebonsari Wetan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang sebelumnya telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Wulan selaku Ketua LKM Mandala sebagai berikut:

“Pada penerimaan anggota KSM selama kegiatan administrasi kami selaku pihak penyelenggara melakukan pemantauan agar program *cash for work* ini tepat pada sasaran masyarakat MBR. Evaluasi yang kami lakukan selama ini untuk mendorong pelaksanaan kegiatan agar segala proyek infrastruktur sesuai dengan rencana sebelumnya dengan melakukan rapat-rapat pada setiap selesai kegiatan perbaikan infrastruktur dengan melihat hasil dan penilaian dari pekerja selama di lapangan.”(Wawancara dengan Sri Wulan Cahyani pada Selasa, 22 Februari 2022 pukul 11.00 WIB).

Hal yang sama juga dinyatakan Bapak Sunari selaku masyarakat penerima program CFW, beliau menyatakan:

“Yang memilih pekerja setahu saya itu bukan dari Ibu Lurah tapi dari LKM Mandala dan selama proses administrasi memang disesuaikan dengan kondisi saat ini, banyak masyarakat yang turut daftar tetapi hanya sebagian saja yang bisa ikut dalam kegiatan perbaikan program CFW ini. Evaluasi dan pemantauan selama proses administrasi adalah dilakukan oleh LKM sendiri. Untuk evaluasinya biasanya dilakukan bertahap bersama kelurahan.” (Wawancara dengan Sunari Abdul Gofur pada Selasa, 15 Maret 2022 pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan seluruh pernyataan yang telah dikemukakan diatas pada indikator ketepatan sasaran dapat disimpulkan bahwa program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan sudah tepat pada penerima program dan tepat

pada perbaikan infrastruktur. Keterbatasan anggaran yang disediakan untuk kelurahan mengakibatkan tidak semua calon pendaftar diterima sebagai anggota KSM bisa tercakup dalam program. Pada dimensi efektivitas pelaksanaan perbaikan infrastruktur sudah sesuai dengan aspirasi dan mengedepankan prioritas masyarakat yang pelaksanaannya melalui peningkatan kapasitas masyarakat yang sudah direncanakan sebelumnya.

Dalam prinsip upaya mitigasi, pada pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan pada indikator ketepatan sasaran dinilai telah memenuhi ke tiga prinsip mitigasi diantaranya upaya mitigasi bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak, prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan, serta dibutuhkan evaluasi dan pemantauann secara berkelanjutan (Harjadi, dkk (2007)). Pada prinsip upaya mitigasi bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak, bahwa pelaksanaan program *cash for work* dalam mencapai sasaran dengan perhitungan biaya agar pelaksanaan kegiatan perbaikan infrastruktur sesuai sasaran yang sebelumnya ditentukan. Prinsip prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan, yakni masyarakat MBR telah sesuai dengan kriteria penerima program. Prinsip dibutuhkan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan dengan upaya pemantauan dalam kegiatan administrasi dan evaluasi secara bertahap.

### **c. Ketepatan Waktu**

Pada variabel ketepatan waktu merupakan hal yang penting dalam menilai keefektifan suatu pelaksanaan program. Dalam suatu program waktu merupakan acuan yang perlu ditetapkan sebelum program tersebut

direalisasikan. Untuk mengukur ketepatan waktu dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan target waktu yang ditentukan sebelumnya. Ketepatan waktu dalam penelitian ini yaitu ketika pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan sesuai dengan aturan waktu yang telah ditentukan pada buku petunjuk prosedur operasional standar penyelenggaraan program *cash for work* Tahun 2021 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berikut pemaparan hasil wawancara pada indikator ketepatan waktu bahwa untuk membuat target waktu pada proyek perbaikan infrastruktur aktor pelaksana melakukan survey teknis infrastruktur yang akan diperbaiki agar tepat pada penentuan waktu, Hal ini diungkapkan oleh Ibu Wulan selaku Ketua LKM Mandala sebagai berikut:

“Survey teknis ini dilakukan oleh kelurahan, LKM dan anggota KSM, penetapan waktunya disesuaikan dengan tingkat kerusakan pada bangunan infrastruktur. Program CFW pertama kali dilaksanakan di kelurahan Kebonsari Wetan tentu harus disiplin dalam waktu, karena jika melebihi batas waktu maka kesannya program ini tidak efektif dilaksanakan di sini. Apalagi kan program CFW ini program dari kementerian PUPR yang baru pertama kali dilaksanakan di kelurahan. Survey dilakukan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Hal yang perlu dilihat di lapangan adalah apa saja kerusakan yang terjadi serta waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan program *cash for work* ini. Target waktu yang ditentukan dari PUPR adalah 60 hari kerja khusus pelaksanaan perbaikannya. 16 hari itu tahap perencanaan yaitu mulai dari sosialisasi, kegiatan pelatihan pengadaan pertukangan, survey teknis dan bahan material hingga pencairan dananya.” (Wawancara dengan Sri Wulan Cahyani pada Selasa, 22 Februari 2022 pukul 11.00 WIB).

Untuk melihat kesesuaian dengan apa yang disampaikan informan, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawali selaku masyarakat penerima program CFW, beliau menyatakan:

“Iya mbak ada survey lokasi perbaikan infrastruktur. Yang menetapkan waktu itu dari LKM Mandala maksimal untuk seluruh pelaksanaan kegiatan itu selama 2 bulan. Perbaikannya kan bermacam-macam tergantung dari kerusakan yang perlu diperbaiki kan ada kerusakan ringan, sedang dan berat. Kalau ringan kira-kira 5-7 hari.” (Wawancara dengan Achmad Sawali pada hari Rabu, 9 Maret 2022 pukul 09.00 WIB).

Dari hasil wawancara di atas menyatakan sebelum program direalisasikan kelurahan, LKM dan anggota KSM melakukan survey lokasi pada bangunan infrastruktur yang akan diperbaiki terlebih dahulu agar tidak melebihi waktu target dari Kementerian PUPR yakni 60 hari kerja pada pelaksanaannya. Hasil survey memperoleh perencanaan waktu yakni untuk setiap kegiatan proyek perbaikan didasarkan pada tingkat kesulitan tergantung pada perbaikan yang dilakukan. Hasil survey memberikan target waktu untuk setiap kegiatan ringan adalah maksimal 3-5 hari pengerjaan seperti pengecatan pada gorong-gorong atau marka jalan, pengambilan sedimen, dan untuk perbaikan sedang rencana waktu adalah 5-7 hari seperti perbaikan pada saluran drainase atau gorong-gorong pemukiman dan penggantian penutup Perbaikan jalan pada gang dan untuk perbaikan yang dirasa membutuhkan waktu lama target waktu yang dikerjakan adalah 7-10 hari kerja seperti pemavingan blok jalan lingkungan dengan konstruksi paving dan pemasangan bak kontrol.

Hasil wawancara berikutnya mengungkapkan bahwa pelaksanaan dari tahap perencanaan hingga pengerjaan proyek perbaikan infrastruktur sudah direalisasikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan begitupun dengan

jam kerja bagi pekerja yang sudah tepat pada jam efektif 6-7 jam, ungkapan ini dinyatakan oleh Bapak Ilham selaku Ketua Pelaksana dalam program *cash for work* sebagai berikut:

“Realisasi di lapangan sudah tepat waktu dari tahap perencanaan hingga pengerjaan proyek perbaikan seperti yang direncanakan sebelumnya. Tidak ada proyek yang pelaksanaannya molor belum terselesaikan Untuk program CFW ini merupakan program dalam jangka pendek hanya 60 hari tapi disini pelaksanaannya hanya 50 hari selebihnya membuat laporan. Kemudian untuk jam kerja pekerja juga sudah pasti tepat waktu dek pada jam efektif dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore sesuai panduan POS CFW. Kegiatannya tidak setiap hari, hari minggu libur.” (Wawancara dengan Moch Choirul Ilham pada Jumat, 11 Februari 2022 pukul 10.00 WIB).

Hal senada disampaikan Bapak Sawali selaku masyarakat menyatakan:

“Saya lihat kegiatannya semua sudah sesuai waktu yang ditentukan, Pekerja selalu tepat waktu mengerjakan proyek perbaikan infrastrukturnya. Penyelesaian kegiatan perbaikannya kurang lebih sekitar 50 hari. Untuk kegiatan pelaksanaannya seperti tukang biasanya dari jam 7 pagi- 4 sore Dzuhur itu berhenti, nanti jam 1 diterusin lagi.” (Wawancara dengan Guntur Purnomo pada Senin, 14 Maret 2022 pukul 11.00 WIB).

Dari hasil wawancara di atas bahwasanya pelaksanaan program CFW di kelurahan Kebonsari Wetan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Semua kegiatan proyek kegiatan infrastruktur tidak ada satupun yang melebihi target waktu. Jam kerja bagi pekerja dirasa sudah efektif sesuai dengan POS penyelenggaraan CFW Tahun 2021.

Dalam melaksanakan upaya mitigasi tentu harus menerapkan prinsip-prinsip upaya mitigasi sesuai dengan pendapat Harjadi dkk, (2007) diantaranya, upaya mitigasi bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak, prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan, serta

dibutuhkan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan pada keterkaitan antara ketepatan waktu dengan ketiga prinsip-prinsip diatas terhadap pelaksanaan program *cash for work* (CFW) di Kelurahan Kebonsari Wetan maka didapat hasil sebagai berikut:

- 1) Prinsip Upaya mitigasi bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak.

Hubungan keterkaitan antara ketepatan waktu dengan prinsip upaya mitigasi harus bersifat kompleks pada pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan bahwa dalam menerpakan prinsip ini upaya yang dilakukan adalah sebelum dilaksanakan perbaikan infrastruktur, LKM Mandala beserta pekerja melaksanakan survey lokasi untuk melihat kerusakan perbaikan dan menentukan waktu untuk setiap kegiatan perbaikan agar ada target waktu dalam pelaksanaannya sehingga pelaksanaan kegiatan dapat efektif. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ilham Ketua Pelaksana dalam program *cash for work* sebagai berikut:

“Untuk target waktunya kami melakukan survey dulu bersama anggota KSM. Disana kami menentukan waktunya dengan melihat kerusakan yang terjadi apakah dalam kategori sedang, ringan atau berat. Semua ada batas waktunya, agar pelaksanaannya ini tidak melebihi waktu yang ditetapkan pemerintah, kalau untuk prinsipnya kami sudah sesuai prinsip pelaksanaan yang transparan, akuntabel mudah dikerjakan itu. Waktu ini juga perlu diperhitungkan karena dana juga hanya dari kementerian PUPR tanpa ada dana tambahan apapun.” (Wawancara dengan Moch Choirul Ilham pada Jumat, 11 Februari 2022 pukul 10.00 WIB).



Senada dengan hal diatas, Bapak Sunari selaku masyarakat penerima program CFW, juga mengatakan:

“Waktunya sudah dari LKM sebelumnya ada survey lokasi dengan musyawarah bersama pekerja untuk melihat kerusakan apa yang perlu di perbaiki dalam kegiatan infrastrukturnya. Ada beberapa titik yang memang perbaikannya perlu memerlukan waktu beberapa hari.” (Wawancara dengan Sunari Abdul Gofur pada Selasa, 15 Maret 2022 pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada indikator ketepatan waktu bila dikaitkan dengan prinsip upaya mitigasi bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan sudah sesuai dengan aturan waktu yang ditentukan sebelumnya, tindakan yang dilakukan dalam ketepatan waktu sudah sesuai dengan prinsip dengan melakukan perencanaan dalam segi hal waktu dan dalam penentuan waktu melibatkan pihak pekerja bukan saja atas dasar ketetapan LKM.

## 2) Prinsip Prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan

Dilihat berdasarkan indikator ketepatan waktu dengan prinsip mitigasi kedua ini terdapat hubungan yang bisa dinilai bahwa pelaksanaan upaya mitigasi melalui program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan berdasarkan telah menerapkan aturan waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan mengikut sertakan kelompok rentan yakni masyarakat kelompok MBR yang menjadi sasaran utama dalam program ini. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Wulan selaku ketua LKM Mandala sebagai berikut:

“Seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa ketepatan waktu ini kami lakukan dari hasil survey bersama masyarakat sebagai pekerja dan untuk penerima program kami benar-benar menjangkau melalui proses administrasi agar penerima adalah kelompok dari masyarakat MBR.” (Wawancara dengan Sri Wulan Cahyani pada Selasa, 22 Februari 2022 pukul 11.00 WIB).

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Sawali selaku masyarakat penerima program CFW sebagai berikut:

“Untuk penerimanya semuanya dari masyarakat yang terdampak *covid-19* dipekerjanya seperti yang terkena PHK dan dirumahkan. Waktu dari pengerjaannya sudah sesuai dengan waktu yang sebelumnya dilakukan survey.” (Wawancara dengan Achmad Sawali pada hari Rabu, 9 Maret 2022 pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan pada indikator ketepatan waktu bila dikaitkan dengan prinsip mitigasi kedua ini adalah kelompok rentan adalah pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan sudah sesuai dengan ketetapan yang sebelumnya ditentukan dari hasil musyawarah antara masyarakat sebagai pekerja dengan LKM Mandala, masyarakat turut serta dalam hal ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini telah sesuai dengan prinsip upaya mitigasi bahwa utama adalah kelompok rentan.

### 3) Prinsip Dibutuhkan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya pada indikator ketepatan waktu yakni pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan dalam prinsip evaluasi telah diterapkan dalam selama kegiatan dengan melakukan pemantauan pada setiap pelaksanaan kegiatan perbaikan

infrastruktur. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Ilham selaku Ketua Pelaksana dalam program *cash for work* sebagai berikut:

“Sebetulnya untuk pemantauan ini dilakukan setiap hari ketika ada kegiatan perbaikan meskipun waktunya tidak selalu berada di lapangan, tetapi setiap hari saya selalu melakukan pemantauan untuk mengevaluasi kegiatan di lapangan, takutnya ada pekerja yang tidak bekerja sesuai aturan selain itu juga tentu untuk mencapai waktu yang telah ditentukan tidak melebihi dari 60 hari kerja, sebab itu sudah batas waktu dari Kementerian itu sendiri.” (Wawancara dengan Moch Choirul Ilham pada Jumat, 11 Februari 2022 pukul 10.00 WIB).

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Sunari selaku masyarakat penerima program CFW, beliau mengatakan:

“Sudah sesuai waktu semua proyek yang kami kerjakan mbak, dan ada pendampingan juga dalam setiap pelaksanaan untuk evaluasi biasanya dilakukan gabungan antara pekerja dengan ketua pelaksana, LKM dan dari pihak kelurahan itu sendiri.” (Wawancara dengan Sunari Abdul Gofur pada Selasa, 15 Maret 2022 pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan dalam indikator ketepatan waktu pada prinsip upaya mitigasi yang diutuhkan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan bisa dinyatakan sudah sesuai dengan prinsip diatas. Dilihat dari hasil pernyataan yang mana dalam penyelesaian kegiatan dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui pendampingan di setiap pelaksanaan perbaikan proyek infrastruktur.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan penentuan target waktu perbaikan infrastruktur didasarkan pada jenis perbaikan dengan melakukan survey pada lokasi perbaikan infrastruktur untuk memastikan pengerjaan proyek waktu yang dibutuhkan agar tidak melebihi dari ketetapan

Kementerian PUPR yakni 60 hari. Pelaksanaan yang dilakukan dengan 14 tempat dan perbaikan yang berbeda, pada pelaksanaannya mampu dikerjakan dengan kurun waktu kurang lebih 50 hari dengan sisa waktu membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ). Selain itu pada indikator ketepatan waktu sudah menerapkan ke tiga prinsip upaya mitigasi yang dikemukakan oleh Harjadi dkk, (2007) mulai dari melakukan perencanaan dalam segi hal waktu, melakukan penentuan waktu bersama masyarakat MBR sebagai pekerja hingga pendampingan pada setiap kegiatan.

#### **d. Tercapainya Tujuan**

Dalam sebuah program ketepatan tujuan dalam menentukan tujuan merupakan bagian dari aktivitas organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk menilai tingkat keefektifan pada indikator ini adalah dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dapat dicapai. Hasil wawancara menyatakan bahwa untuk mendorong pencapaian tujuan dari program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan, pihak Kelurahan beserta tim dan LKM Mandala selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program baik dari segi finansial maupun prosedur agar pelaksanaan program tercapai dengan maksimal. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bapak Ronny Kurniawan., S.H, M.AP selaku Sekretaris Lurah Kebonsari Wetan, sebagai berikut:

“Ada pengawasan mbak dalam setiap kegiatan perbaikan infrastruktur. Pengawasan dilakukan oleh Kelurahan dan LKM. Jadi disini kelurahan sudah bisa banyak berkontribusi dalam pengawasan. Ini kan yang banyak berperan LKM dan KSMnya. Termasuk dana yang masuk kepada LKM dan ditransfer ke anggota KSM tentu perlu pengawasan dalam hal

pengelolaan keuangan sebab ada laporannya semua dalam bentuk LPJ. Prinsip yang kita gunakan sudah diterapkan pada pelaksanaan program selama kegiatan. Selain itu kami juga melakukan monitoring dan rapat secara berkala.” (Wawancara dengan Ronny Kurniawan., S.H, M.AP pada Jumat, 11 Februari 2022 pukul 09.15 WIB).

Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Sunari selaku masyarakat penerima program CFW, beliau mengatakan:

“Pengawasannya dilakukan waktu di lapangan dan pembuatan laporan. Yang membuat laporan itu KSM tetapi dibantu juga oleh BKM untuk melihat kesesuaian antara pengeluaran dengan bahan yang dibeli. Setiap kali penyelesain proyek selalu melakukan rapat untuk evaluasi dari kegiatan.” (Wawancara dengan Sunari Abdul Gofur pada Selasa, 15 Maret 2022 pukul 09.30 WIB).

Melihat hasil wawancara yang menyatakan selalu dilakukannya pengawasan oleh tim pelaksana yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan pengelolaan dana agar tujuan yang dicapai dapat sesuai dengan yang direncanakan serta menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran maupun prosedur. Pengawasan ini dilakukan mulai dari tahap pelaksanaan hingga pembuatan laporan pertanggung jawaban (LPJ). Terkait dengan prinsip pelaksanaan yang ditemukan selama penelitian menyatakan bahwa prinsip pelaksanaan sesuai dengan prosedur operasional standar (POS) penyelenggaraan kegiatan program *cash for work* yaitu partisipasi, transparan dan akuntabel, sederhana dan mudah dikerjakan, berkualitas secara layak dan keberlanjutan.

Hasil wawancara selanjutnya menyatakan bahwa pelaksanaan program *cash for work* di kelurahan Kebonsari Wetan berjalan dengan baik dan telah tercapainya tujuan program sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya. Hal ini

diungkapkan oleh Bapak Ilham selaku Ketua Pelaksana dalam program *cash for work* sebagai berikut:

“Mengenai pencapaian tujuan semuanya sudah tercapai maksimal mbak, pelaksanaannya sudah berjalan baik dari perencanaan sampai realisasi program, tujuan utama program CFW ini kan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang terdampak *covid-19* dan merupakan lanjutan dari program KOTAKU. Tercapainya tujuan yang maksimal ini tidak luput dari rapat-rapat evaluasi rutin yang kami lakukan selama kegiatan.” (Wawancara dengan Moch Choirul Ilham pada Jumat, 11 Februari 2022 pukul 10.00 WIB).

Untuk melihat kesesuaian dengan apa yang disampaikan informan, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Purnomo selaku masyarakat penerima program CFW, beliau mengatakan:

“Kegiatan program ini sudah berjalan dengan baik dan bisa membantu masyarakat pada situasi pandemi seperti ini dengan upah yang diberikan dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan saya rasa sudah tercapai semua tujuannya dan pelaksanaan program sudah sesuai dengan yang direncanakan dan keinginan masyarakat.” (Wawancara dengan Guntur Purnomo pada Senin, 14 Maret 2022 pukul 11.00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan program CFW di Kelurahan Kebonsari Wetan telah mencapai tujuan sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi *covid-19* melalui pemberian upah tenaga kerja dengan serangkaian kegiatan perbaikan aset infrastruktur dan terpeliharanya aset infrastruktur yang dilaksanakan secara swakelola sebagai upaya pemerintah dalam mitigasi pandemi *covid-19*.

Dalam upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah pada sektor ketenagakerjaan melalui program *cash for work* (CFW) tentu harus menerapkan prinsip-prinsip upaya mitigasi yang seringkali banyak digunakan

adalah prinsi-prinsip upaya mitigasi menurut Harjadi dkk, (2007) pelaksanaan upaya mitigasi perlu terdapat tiga prinsip yang diterapkan yakni diantaranya, upaya mitigasi bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak, prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan, serta dibutuhkan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan. Jika dilihat dari prinsip-prinsip mitigasi bencana yang dikemukakan oleh Harjadi dkk, (2007) pada pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan yaitu menerpakan prinsip-prinsip sesuai dengan aturan dari Kementerian PUPR dan buku POS penyelenggaraan program *cash for work* tahun 2021. Prinsip tersebut telah dilaksanakan dengan tepat dan baik hal dilaksanakan untuk menciptakan rehabilitasi pembangunan yang layak dan tepat sasaran serta dapat memberikan dampak kepada masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan pada keterkaitan antara tercapainya tujuan dengan prinsip-prinsip diatas maka didapat hasil sebagai berikut:

- 1) Prinsip Upaya mitigasi bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak.

Hubungan keterkaitan antara tercapainya tujuan dengan prinsip bahwa upaya mitigasi harus bersifat kompleks pada program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan baik dalam hal perbaikan infrastruktur maupun prosedur dalam anggaran yang dikeluarkan untuk mendorong pencapaian program yang maksimal.

Hal ini dinyatakan oleh Ibu Wulan selaku ketua LKM Mandala sebagai berikut:

“Kalau untuk tujuannya sudah tercapai maksimal yaitu untuk memelihara pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh program KOTAKU. Jadi kami melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan untuk mencapai tujuan termasuk dalam hal pelaporan keuangan sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan hal ini agar tidak memicu proyek infrastruktur yang terbengkalai karena kurangnya dana. Selain itu juga setiap pelaporan akan dipertanggung jawabkan pada kegiatan monitoring evaluasi bersama Dinas PUPR itu sendiri. Pelibatan dalam pembuatan laporan juga melibatkan para pekerja dan juga LKM Mandala.” (Wawancara dengan Sri Wulan Cahyani pada Selasa, 22 Februari 2022 pukul 11.00 WIB).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Purnomo selaku masyarakat penerima program CFW, beliau mengatakan:

“Tujuan utamanya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak dengan upah yang diberikan bisa digunakan untuk kebutuhan. Pengawasan dilakukan bukan saja oleh Bapak Ilham sebagai ketua pelaksana tetapi juga dari anggota-anggota LKM Mandala. Biasanya pengawasan itu dilakukan dilapangan pada kegiatan infrastruktur termasuk pada perbaikan yang masuk dalam kategori sulit dan banyak mengeluarkan dana.” (Wawancara dengan Guntur Purnomo pada Senin, 14 Maret 2022 pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara tercapainya tujuan dengan prinsip upaya mitigasi bersifat kompleks dan melibatkan berbagai pihak yakni bahwa untuk mencapai tujuan pihak LKM mandala melalui ketua pelaksana melakukan pengawasan dengan tujuan penggunaan anggaran yang kelaur benar-benar dapat dipergunakan sebaik mungkin tanpa ada penyelewengan.



2) Prinsip Prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan

Dilihat berdasarkan indikator tercapainya tujuan dinilai bahwa penerima program adalah sesuai dengan sasaran yang ditentukan yakni masyarakat MBR yang menitikberatkan masyarakat lokal sebagai pekerja dengan kriteria tertentu. Tentu untuk mencapai tujuan haruslah berhasil dalam hal penerima program adalah kelompok rentan. Hubungan keterkaitan antara tercapainya tujuan dengan bahwa upaya mitigasi prioritas utama adalah kelompok rentan dalam pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari dirasa duah sesuai dan efektif dengan kriteria penerima program dan tujuan dikeluarkannya program. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Ronny Kurniawan., S.H, M.AP selaku Sekretaris Lurah Kebonsari Wetan, beliau mengatakan:

“Program CFW ini memang lebih ditujukan kepada masyarakat MBR yang terdampak, sebenarnya program ini dilaksanakan ketika ada bencana alam tetapi dalam bencana non alam ini pemerintah melalui PUPR memunculkan upaya mitigasi ini untuk membantu masyarakat yang menjadi korban yakni MBR tersebut yang mengalami kehilangan pekerjaan akibat PHK ataupun pemutusan kontrak kerja, dan pasti kami memilih penerima program CFW ini dari golongan masyarakat MBR sebagai kelompok rentan.” (Wawancara dengan Ronny Kurniawan., S.H, M.AP pada Jumat, 11 Februari 2022 pukul 09.15 WIB).

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Anisa selaku sekretaris LKM Mandala sebagai berikut:

“Tujuan dari program ini sudah jelas mbak, bahwa untuk membantu masyarakat MBR yang terdampak *covid-19* sebagai tulang punggung keluarga yang mengalami PHK, pengurangan jam kerja dan lainnya dengan memberikan upah melalui kegiatan perbaikan infrastruktur. Dari situ kami sudah merekrut masyarakat

MBR dalam program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan ini sebagai kelompok rentan karena kehilangan pekerjaan itu.” (Wawancara dengan Ibu Anisa pada Selasa, 22 Februari 2022 pukul 12.00 WIB).

Ungkapan yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Sunari selaku masyarakat penerima program CFW sebagai berikut:

“Tujunnya sudah tercapai mungkin ya, karena yang saya tahu untuk membantu masyarakat sesuai kriteria penerima itu sendiri adalah masyarakat MBR dan memang pekerja yang diterima dalam program *cash for work* ini adalah masyarakat yang ekonominya dibawah dan kebanyakan dirumahakan.” (Wawancara dengan Sunari Abdul Gofur pada Selasa, 15 Maret 2022 pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam indikator tercapainya tujuan dengan prinsip upaya mitigasi prioritas utama adalah kelompok rentan dapat dikatakan telah sesuai dan berhasil dalam mencapai tujuan yang mana tujuan utamanya adalah membantu masyarakat yang terdampak *covid-19* akibat banyaknya masyarakat yang dirumahakan pemutusan kontrak kerja hingga PHK.

3) Prinsip Dibutuhkan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan.

Evaluasi ini perlu dilakukan untuk meninjau keadaan dari pembangunan atau perbaikan dalam upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan pada indikator tercapainya tujuan pada prinsip evaluasi dan pemantauan sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan, yang mana pemantauan dilakukan melauai proses pengawasan dan pendampingan pada setiap kegiatan pelaksanaan program di lapangan untuk mencapai tujuan yang bukan saja membantu masyarakat yang terdampak pandemi *covid-19* namun juga memelihara aset program

KOTAKU. Hal ini merupakan pernyataan dari Ibu Wulan selaku ketua LKM Mandala sebagai berikut:

“Tujuan dari program *cash for work* sudah jelas dengan itu kami selalu melakukan perencanaan dan kegiatan maksimal dari awal agar tujuan tersebut bisa tercapai. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya untuk evaluasi dilakukan untuk menodorong pencapaian tujuan dalam kegiatan perbaikan infrastruktur baik dari segi waktu maupun kecukupan anggaran dengan melakukan pemantauan lewat pendampingan dan pengawasan.” (Wawancara dengan Sri Wulan Cahyani pada Selasa, 22 Februari 2022 pukul 11.00 WIB).

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Sunari selaku masyarakat penerima program CFW beliau mengatakan:

“Pengawasan dilakukan dalam kegiatan ini mulai dari dilapangan hingga pembuatan laporan pertanggung jawaban, pendampingan juga dilakukan untuk mencapai tujuan dengan adanya program *cash for work* ini, mencapai tujuan agar segala proyek perbaikan infrastruktur bisa sesuai dengan waktu dan sasaran sesuai musyawarah sebelumnya.” (Wawancara dengan Sunari Abdul Gofur pada Selasa, 15 Maret 2022 pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan keterkaitan antara indikator tercapainya tujuan dengan prinsip upaya mitigasi dibutuhkan evaluasi pemantauan secara berkelanjutan pada program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan dinilai telah sesuai dengan prinsip tersebut. Pemantauan dilakukan melalui pengawasan dan pendampingan dalam kegiatan agar segala proyek perbaikan infrastruktur berjalan sesuai dengan tujuan yang sebelumnya telah ditentukan.

Berdasarkan keseluruhan wawancara diatas pada indikator tercapainya tujuan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program sudah maksimal mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan program dalam pencapaian tujuan

sebelumnya. Pencapaian tujuan ini tidak lain dari adanya pengawasan terhadap pelaksanaan program dan menerapkan prinsip-prinsip pelaksanaan sesuai POS penyelenggaraan CFW. Berkaitan dengan prinsip mitigasi, maka dinilai pada indikator ini telah sesuai dengan ketiga prinsip yang mana kegiatan pelaksanaan perbaikan infrastruktur didasari pada pemantauan dan pengawasan serta pendampingan agar program CFW di Kelurahan Kebonsari Wetan dapat tercapai maksimal sesuai dengan tujuan, khususnya tujuan dari pemerintah.

Tujuan yang dicapai adalah membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui upah yang diberikan serta pencapaian tujuan yang lain adalah meninggalkan masalah kekumuhan melalui perbaikan ringan infrastruktur pada aset program KOTAKU. Tercapainya segala tujuan tidak lepas dari rapat-repat evaluasi rutin yang dilakukan oleh Kelurahan bersama LKM Mandala dan tim pelaksana di lapangan.

#### **e. Perubahan Nyata**

Perubahan nyata merupakan bagian akhir dari pelaksanaan sebuah program. Indikator ini dapat diukur dengan melihat perubahan atau hasil yang didapatkan apakah benar sesuai dengan target atau justru tidak memberikan perubahan sama sekali kepada masyarakat. Perubahan nyata, dalam penelitian ini peneliti hendak melihat perubahan dampak positif nyata yang dirasakan oleh masyarakat penerima program *cash for work* maupun masyarakat bukan penerima program.

Berikut pemaparan hasil wawancara pada indikator perubahan nyata bahwa program *cash for work* memberikan dampak perubahan nyata kepada masyarakat baik penerima program dengan dapat membantu perekonomian masyarakat melalui upah yang diterima sedangkan bagi bukan penerima program dampak perubahan nyata yang dirasakan adalah perubahan lingkungan dapat mengatasi masalah pemukiman masyarakat dengan adanya perbaikan infrastruktur. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Wulan selaku ketua LKM Mandala sebagai berikut:

“Kalau untuk perubahan nyata bagi masyarakat yang jadi pekerja sudah pasti perubahannya itu bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dari upah yang diterima, kalau bagi masyarakat yang bukan penerima bisa lihat dari lingkungan yang diperbaiki dari kegiatan program CFW ini bisa dilihat dari perbaikan infrastrukturnya. Adanya pembekalan teknis bagi para pekerja memberikan pengetahuan baru tentang pertukangan bagi para pekerja.” (Wawancara dengan Sri Wulan Cahyani pada Selasa, 22 Februari 2022 pukul 11.00 WIB).

Namun pernyataan lain menyatakan bahwa perubahan nyata dari segi ekonomi belum bisa dirasakan memberikan perubahan secara berkelanjutan karena program CFW yang sifatnya hanya sementara, jika proyek perbaikan infrastruktur sudah selesai maka masyarakat sebagai pekerja tidak dapat lagi melaksanakan pekerjaannya dan menerima upahnya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sunari selaku masyarakat penerima program CFW sebagai berikut:

“Yang saya rasakan dengan adanya program CFW ini adalah bisa membantu saya dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, saya merasa cukup dengan upah yang saya terima selama pelaksanaan program tapi program ini tidak berkelanjutan, jadi hanya bisa memberikan manfaat saat ini saja yang saya tahu ini hanya program saat pandemi. Jadi masyarakat yang ikut program kembali menganggur. Perubahan yang lain yaitu perbaikan infrastruktur hasilnya bisa mengatasi masalah kerusakan khususnya masalah kekumuhan.” (Wawancara dengan Sunari Abdul Gofur pada Selasa, 15 Maret 2022 pukul 09.30 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program CFW memberikan dampak perubahan nyata baik kepada penerima program maupun bukan penerima program, namun disayangkan dampak dari segi ekonomi adanya program ini dirasakan sementara karena program yang tidak berkelanjutan.

Hasil wawancara selanjutnya menyatakan bahwasanya setelah proyek selesai dikerjakan terdapat proses pemeliharaan berkelanjutan atau biasa disebut dengan pemantauan berkelanjutan pasca perbaikan infrastruktur untuk melihat kondisi bangunan infrastruktur yang telah diperbaiki yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah kelurahan selama enam bulan dari perbaikan infrastruktur. Hal ini di ungkapkan oleh Ibu Wulan selaku ketua LKM Mandala. Beliau menyatakan sebagai berikut:

“Pemeliharaan atau perawatannya jika dalam kurun waktu 6 bulan ada kerusakan itu masih menjadi tanggung jawab dari LKM Mandala. Biasanya kami melakukan pemeliharaan lewat kerja bakti. Dana BPM program *cash for work* ini masih ada sisa, dan sisanya memang disimpan untuk perawatan. Namun setelah lebih dari 6 bulan itu ada audit dari PU sendiri sudah menjadi tanggung jawab KPP dari PU.” (Wawancara dengan Sri Wulan Cahyani pada Selasa, 22 Februari 2022 pukul 11.00 WIB).

Pernyataan lain datang dari masyarakat yang menyatakan bahwa tidak ada jadwal khusus untuk pemeliharaan atau perawatannya pasca kegiatan perbaikan infrastruktur, kelurahan belum bisa tanggap dalam pemeliharannya sebab masyarakat yang masih memeberikan informasi jika ada penurunan kualitas atau kerusakan pada bangunan infrastruktur. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Sawali selaku masyarakat penerima program CFW sebagai berikut:

“Selama proyek sudah dikerjakan baru sekali melakukan perawatannya karena ada sedikit kerusakan mengenai perbaikan pada saluran gorong-gorongnya. Selebihnya belum ada kegiatan pemeliharaan. Kalau pemeliharannya secara rutin belum ada jadwal khusus. Jika masyarakat tidak ada yang melaporkan tentang kerusakannya ya masih tetap tidak diperbaiki, kelurahan belum bisa tanggap mengenai kerusakan mbak. Mungkin tidak ada dana atau seperti apa saya kurang tahu.” (Wawancara dengan Achmad Sawali pada hari Rabu, 9 Maret 2022 pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemeliharaan berkelanjutan pada infrastruktur yang telah diperbaiki belum sepenuhnya dilaksanakan karena belum adanya tindakan mengenai kerusakan apabila dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan, dan evaluasi serta audit dari Dinas PUPR tidak menentu.

Bentuk mitigasi yang dilakukan melalui program *cash for work* (CFW) yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo apabila dilihat dari prinsip-prinsip mitigasi bencana yang dikemukakan oleh Harjadi dkk, (2007) dimana pelaksanaan mitigasi baik untuk bencana alam maupun non-alam harus memenuhi beberapa prinsip mitigasi yakni diantaranya, upaya mitigasi bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak, prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan, serta dibutuhkan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan. Jika dilihat dari prinsip-prinsip mitigasi bencana yang dikemukakan oleh Harjadi dkk, (2007) pada pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan adalah belum ada evaluasi dan pemantauan berkelanjutan pasca kegiatan program *cash for work* dengan kegiatan pemeliharaan infrastruktur yang terjadwal. Berdasarkan hasil

wawancara yang dilakukan dengan informan pada keterkaitan antara indikator perubahan nyata dengan prinsip-prinsip diatas maka didapat hasil sebagai berikut:

- 1) Prinsip Upaya mitigasi bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak.

Hubungan keterkaitan antara indikator tercapainya tujuan dengan prinsip bahwa upaya mitigasi harus bersifat kompleks dan melibatkan berbagai pihak yaitu pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan merasakan dampak yang positif dengan adanya program ini dimana keetrlibatan masyarakat sebagai pekerja, pemerintah dan toko bahan material bisa saling melakukan kerja sama selain itu juga perubahan nyata yang dirasa bukan saja bagi penerima program tetapi juga bagi penerima manfaat dengan adanya program ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Wulan selaku Ketua LKM Mandala, beliau menyatakan:

“Pelaksanaanya mulai dari awal sampai akhir bisa menciptakan kerjasama yang baik antara penyelenggara dengan pelaksana, kemudian bisa membantu masyarakat melalui upah yang diberikan. Dampak perubahan yang terlihat itu dari kegiatan perbaikan infrastruktur sebelumnya dari program KOTAKU masalah kekumuhan bisa diperbaiki dengan adanya program CFW ini seperti kerusakan yang terjadi pada penutupan saluran dan jalan. Jadi bisa memberikan kesan pemukiman yang rapi. Jadi ini dampaknya positif sekali.” (Wawancara dengan Sri Wulan Cahyani pada Selasa, 22 Februari 2022 pukul 11.00 WIB).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sunari selaku masyarakat penerima program CFW, menyatakan bahwa:



“Dari persiapan sampai selesai semua sesuai dengan perencanaan dan perubahan yang sangat nampak dari kegiatan infrastrukturnya bisa membuat lebih rapi dan kekumuhan bisa diatasi serta membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dengan upah yang diterima.” (Wawancara dengan Sunari Abdul Gofur pada Selasa, 15 Maret 2022 pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan keterkaitan antara indikator tercapainya tujuan dengan prinsip upaya mitigasi bersifat kompleks dan melibatkan berbagai pihak pada program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan dinilai pada dampak perubahan nyata yang terlihat oleh masyarakat adalah perbaikan infrastruktur yang dapat mengatasi masalah kekumuhan di wilayah sekitar dan bisa meningkatkan kerjasama antara penyelenggara dengan pelaksana yakni pihak yang terlibat antara masyarakat, pemerintah kelurahan dan pemilik toko supliyer bahan material.

## 2) Prinsip Prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan

Kelompok rentan dalam bencana non-alam ini adalah mereka yang terdampak *covid-19* dalam pekerjaannya terkhusus adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah sasaran. Dilihat berdasarkan indikator perubahan nyata dengan prinsip mitigasi kedua ini terdapat hubungan yang bisa dinilai bahwa perubahan nyata yang dirasakan penerima maupun bukan penerima program *cash for work* berdampak positif kepada masyarakat sekitar. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Anisa selaku sekretaris LKM Mandala sebagai yang menilai dampak perubahan nyata terhadap masyarakat penerima program adalah dapat membantu masyarakat walaupun belum sepenuhnya upah yang diterima

belum dapat mensejahterakan masyarakat serta penerima program adalah masyarakat miskin berpenghasilan rendah (MBR) yang terdampak dari adanya PHK, dirumahkan maupun pengurangan jam kerja. Hasil wawancara diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Kami menjaring pekerja ini sudah sesuai prosedur dari buku POS CFW, setiap kegiatan selalu berpedoman dalam buku tersebut. Kriteria penerima hingga pelaksanaan sudah sesuai itu mbak, kami tidak seenaknya merekrut karena nanti ada audit dari PUPR sendiri jadi harus menyertakan KTP pekerja. Kami mengutamakan masyarakat MBR yang mengalami PHK dan sejenisnya. Selama ini perubahan nyata yang bisa dilihat adalah dengan upah yang diterima selama kurang lebih 2 bulan itu sehingga mereka merasa terbantu dengan adanya program ini walaupun belum sepenuhnya bisa mensejahterakan masyarakat.”(Wawancara dengan Ibu Anisa pada Selasa, 22 Februari 2022 pukul 12.00 WIB).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sawali selaku masyarakat penerima program CFW menyatakan bahwa:

“Programnya sudah bisa mengatasi masalah di masyarakat termasuk pada perekonomian, dengan adanya program ini dapat membantu masyarakat khususnya MBR karena bisa memenuhi kebutuhan lewat upah yang diterima walapun upah yang diterima tidak tinggi tapi sudah dirasa bisa membantu.” (Wawancara dengan Achmad Sawali pada hari Rabu, 9 Maret 2022 pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan pada keterkaitan indikator perubahan nyata dengan prinsip prioritas utama adalah kelompok rentan yakni dengan adanya program CFW masyarakat merasa terbantu dapat dilihat dari perubahan nyata penerima program dapat membantu perekonomian masyarakat serta bagi bukan penerima program bisa merasakan perubahan lewat perbaikan infrastruktur yang dikerjakan.

3) Prinsip Dibutuhkan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan.

Evaluasi ini perlu dilakukan untuk meninjau keadaan dari pembangunan atau perbaikan dalam upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya pada indikator perubahan nyata pada prinsip evaluasi dan pemantauan belum dirasa menerapkan prinsip ini, sebab evaluasi secara berkelanjutan belum dilakukan pada pasca kegiatan program *cash for work* ini dilaksanakan dalam proses pemeliharaan infrastruktur. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Wulan selaku Ketua LKM Mandala sebagai berikut:

“Untuk pemantauan dilakukan dalam pengawasan dan pendampingan pada kegiatan namun dalam hal keberlanjutan masih belum dilaksanakan. Pemeliharaan berkelanjutannya belum dilakukan selama ini. Jadwal khusus untuk pemeliharannya belum ada. Kami melakukan pemantauan hanya pada saat 6 bulan setelah kegiatan karena masih menjadi tanggung jawab kami, selama anggaran masih ada kami lakukan perbaikan jika melebihi batas dari 6 bulan kalau sudah tidak ada maka masih menunggu anggaran dari pemerintah keluar. Evaluasi dari dinas PUPR juga biasanya ada audit kurang lebih 3 tahun sekali” (Wawancara dengan Sri Wulan Cahyani pada Selasa, 22 Februari 2022 pukul 11.00 WIB).

Hal senada juga di ungkapkan oleh Bapak Purnomo selaku masyarakat penerima program CFW, menyatakan bahwa:

“Betul mbak untuk pemeliharaan berkelanjutan tidak ada seperti kerja baktipun tidak ada. Untuk pemeliharannya masyarakat juga tidak melaksanakan pemeliharaan karena kan kalau ada kerusakan pasti mengeluarkan biaya. Selama ini memang belum ada kerusakan.” (Wawancara dengan Purnomo pada Selasa, 15 Maret 2022 pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dapat disimpulkan tanggapan masyarakat menyatakan bahwa program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan sudah cukup baik pada segi perbaikan infrastruktur dapat memberikan perubahan nyata dari masalah kekumuhan dan kerusakan penurunan kualitas

infrastruktur aset program KOTAKU. Namun disayangkan partisipasi dalam pengambilan manfaat setelah adanya perbaikan infrastruktur dalam program *cash for work* belum ada pelaksanaan perawatan secara berkesinambungan dan tidak ada pengawasan secara berkala dari pihak kelurahan maupun LKM Mandala.

### **C. Analisis dan Interpretasi Data**

Pada bagian ini penulis akan menyajikan dan memaparkan hasil penelitian di lapangan sesuai data dan fakta serta disesuaikan dengan teori yang digunakan sebagai bahan rujukan untuk menjawab dari rumusan masalah penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengkonfirmasi dan membandingkan dengan teori yang digunakan oleh penulis untuk menghasilkan data kesimpulan yang tepat dan objektif.

#### **1. Efektivitas Program *Cash For Work* (CFW) Dalam Kegiatan Infrastruktur Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Mitigasi Pandemi *COVID-19* Di Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.**

Dalam melaksanakan suatu program, penilaian efektivitas merupakan suatu hal yang begitu penting dilakukan guna memperoleh hasil dan informasi mengenai realisasi suatu program baik dari segi sejauh mana implikasi atau manfaat yang dihasilkan oleh program yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program berikutnya baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Pelaksanaan program *cash for work* (CFW) dalam penelitian ini

menekankan kepada aspek efektivitas pelaksanaan program *cash for work*. Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Oleh karena itu, diperlukan suatu indikator atau ukuran untuk menilai efektivitas dalam program *cash for work* (CFW). Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas yang diperkenalkan Oleh Sutrisno (dalam Wulandari, 2018:16) terdapat 5 indikator untuk menilai capaian efektivitas suatu program diantaranya yaitu: Pemahaman Program, Ketepatan Sasaran, Ketepatan Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata. Teori tersebut digunakan untuk mengetahui capaian pelaksanaan efektivitas program CFW di Kelurahan Kebonsari Wetan pada masa pandemi *covid-19*. Hasil analisis dan interpretasi data penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

**a. Pemahaman Program**

Salah satu indikator untuk mengukur keefektifan suatu program menurut Sutrisno (dalam Wulandari, 2018:16) yaitu pemahaman program. Pemahaman program yang dimaksud yakni sejauh mana sasaran dari program dapat memahami pelaksanaan program. Dalam indikator ini bukan hanya masyarakat yang menjadi target namun juga keterlibatan pihak instansi yang akan memonitoring program agar penerima dan agen pelaksana paham akan program *cash for work*. Berdasarkan pada penilaian subyektif program *cash for work* yang dilaksanakan di Kelurahan Kebonsari Wetan pada indikator ukuran pemahaman program dilihat dari

kacamata teori efektivitas menurut Sutrisno (dalam Wulandari 2018:16) dapat dikatakan efektif dan dapat diterima di lingkungan masyarakat.

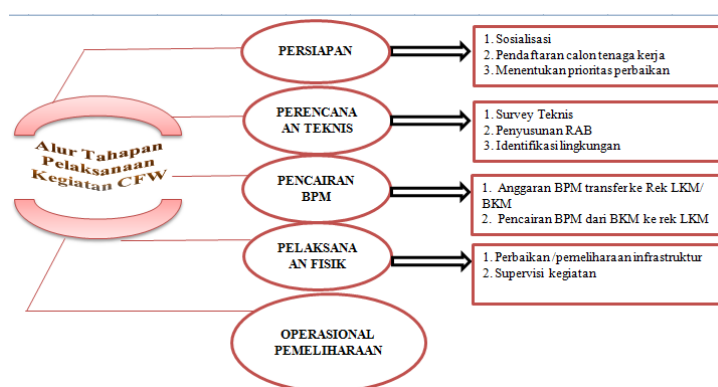
Bentuk pemahaman program yang dilakukan oleh pihak kelurahan kepada target sasaran yaitu masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan pertukangan sebelum pelaksanaan program direalisasikan di lapangan. Sesuai dengan pernyataan bahwa dalam pelaksanaan suatu program perlu adanya komunikasi, baik komunikasi antar para implementor, birokrat dan target kebijakan. Komunikasi menjadi salah satu cara agar tujuan dan sasaran dari suatu program yang ada dapat tersampaikan kepada kelompok sasaran yakni masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan penyebaran informasi program *cash for work* agar masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan mengetahui tentang program CFW dan ketika program dijalankan dapat dengan mudah dan efektif dalam pelaksanaannya.

Pihak kelurahan pada sosialisasi, pelatihan hingga pendampingan sudah memberikan upaya yang maksimal kepada masyarakat karena pada dasarnya masyarakat sudah memiliki pengetahuan dengan baik mengenai program *cash for work* yang merupakan pengembangan dari program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sebelumnya, maka pemahaman program sudah berjalan optimal dan maksimal dengan sebagian besar masyarakat memahami atau mengetahui pelaksanaan dari program *cash for work* sehingga program ini efektif terlaksana di Kelurahan Kebonsari Wetan. Serangkaian tahapan pelaksanaan kegiatan CFW terdiri dari beberapa

tahap kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan buku pedoman POS (Prosedur Operasional Standar) Penyelenggaraan Program *Cash For Work* Tahun 2021. Secara rinci tahapan pelaksanaan diuraikan dalam gambar dibawah ini:

**Gambar 9**

**Alur tahapan pelaksanaan kegiatan cash for work**



Sumber : Buku POS CFW Tahun 2021 (diolah penulis), 2022

### 1. Persiapan

Pada tahap persiapan ini pelaksana kegiatan adalah pihak Kelurahan Kebonsari Wetan bersama Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Mandala dengan peserta adalah relawan perwakilan masyarakat (RT/RW), dan masyarakat sasaran program melaksanakan sosialisasi mengenai informasi pendaftaran calon tenaga kerja CFW dan pendaftaran calon tenaga kerja. Kegiatan yang kedua dalam tahap persiapan yaitu penentuan prioritas infrastruktur CFW dengan menentukan prioritas perbaikan infrastruktur dengan aset yang telah dibangun oleh program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

## 2. Perencanaan

Tahap perencanaan ini adalah tahap penyusunan proposal yang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan menyusun rancangan data hasil survey baik survey teknis ataupun survey bahan material. Rancangan tersebut akan dituangkan dalam penyusunan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Analisis Harga satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. Selanjutnya RAB tersebut akan diajukan untuk di verifikasi proposal KSM dalam pencairan dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM).

## 3. Pencairan Dana

Dalam tahap pencairan dana ini, dana dari pemerintah akan masuk ke rekening LKM Mandala jika proposal sudah di verifikasi oleh tim Pengembangan Kawasan Pemukiman (PKP) Provinsi. Selanjutnya, pencairan dana dari LKM kepada KSM dengan disertai dokumen Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L) untuk pemanfaatan pengeluaran kebutuhan selama pelaksanaan perbaikan infrastruktur.

## 4. Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan masyarakat sebagai tenaga kerja melaksanakan kegiatan perbaikan fisik infrastruktur ringan dan pihak



Kelurahan maupun LKM melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap jalannya program. Untuk pelaksanaan penatausahaan dilakukan oleh bendahara LKM Mandala dengan mencatat setiap pengeluaran dan membuat LPJ yang disampaikan ketika ada monitoring evaluasi pelaporan. Laporan realisasi pelaksana kegiatan akan disampaikan kepada pihak Kelurahan.

#### 5. Pemeliharaan Pasca Kegiatan

Pada tahap kelima ini, pemeliharaan pasca kegiatan program *cash for work* telah terealisasi baik itu pekerjaan pemeliharaan maupun perbaikan maka kelompok penerima dan pemanfaatan akan melanjutkan kegiatan pemeliharaan secara berkala. Kelompok penerima manfaat disini bukan saja masyarakat tenaga kerja CFW, tetapi juga masyarakat sekitar Kelurahan Kebonsari Wetan.

Program *cash for work* merupakan upaya mitigasi pemerintah terhadap pandemi *covid-19* pada sektor ketenagakerjaan tentu harus mengandung upaya mitigasi yang memberikan dampak dan pengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat, bukan saja kepada penerima program melainkan juga terhadap lingkungan sekitar. Jika dilihat berdasarkan prinsip-prinsip upaya mitigasi yang dikemukakan oleh (Harjadi, 2007) dalam bukunya yang berjudul *Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia* maka pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan pada indikator pemahaman program dapat dinilai sudah sesuai dengan prinsip mitigasi.

Adapun penjelasan yang didapat dari hasil wawancara sebelumnya dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Prinsip upaya mitigasi bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak yang mana dalam hal ini bahwa masyarakat sebagai aktor pelaksana dan LKM Mandala sebagai aktor penyelenggara dan pengawas telah memahami program CFW. Pada tahap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan perbaikan infrastruktur dilakukan perencanaan yang matang agar tujuan yang hendak dicapai bisa terwujud serta pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan pada buku pedoman POS penyelenggaraan program *cash for work* tahun 2021 serta pihak yang terlibat adalah seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan melibatkan pihak swasta yakni toko supliyer bahan material.
- 2) Prinsip prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan pada pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan dalam hal ini aktor penyelenggara yakni LKM Mandal dan Kelurahan telah paham mengenai kelompok rentan masyarakat yang perlu diprioritaskan yaitu masyarakat MBR yang terdampak *covid-19* dalam sektor ekonomi termasuk mereka yang bergantung pada pendapatan harian.
- 3) Prinsip Dibutuhkan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan dalam kegiatan infrastruktur pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan belum sepenuhnya

bisa dinyatakan sesuai dengan prinsip ketiga ini. Pelaksanaan evaluasi belum dilaksanakan secara berkala yang mana evaluasi dilakukan selama ada kendala saja dan pemantauan juga dilakukan hanya selama dilapangan tanpa ada berkelanjutan pasca kegiatan infrastruktur terselesaikan.

**b. Ketepatan Sasaran**

Keberhasilan suatu program sangat berpengaruh dengan ketepatan sasaran yang ingin dicapai. Terhambatnya pelaksanaan dari kegiatan program disebabkan kurang tepatnya sasaran sehingga menyebabkan program tersebut belum bisa dikatakan berhasil dan belum berjalan efektif. Dalam indikator ketepatan sasaran ini hal yang perlu diperhatikan adalah penerima atau pelaksanaan program *cash for work* yang memiliki skala prioritas terhadap kebutuhan masyarakat Kelurahan Kebonsari Wetan sebagai upaya pemerintah dalam mitigasi pandemi *covid-19* dan pengurangan dampak resiko dari adanya suatu bencana non-alam ini. Hal ini juga sesuai dengan prinsip mitigasi bencana yang dikemukakan oleh Harjadi dkk, (2007) menyatakan bahwa untuk menjalankan sebuah program mitigasi maka prioritas utama adalah kelompok rentan yang berarti pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya agar program *cash for work* di Kelurahan kebonsari Wetan dapat dinilai efektif.

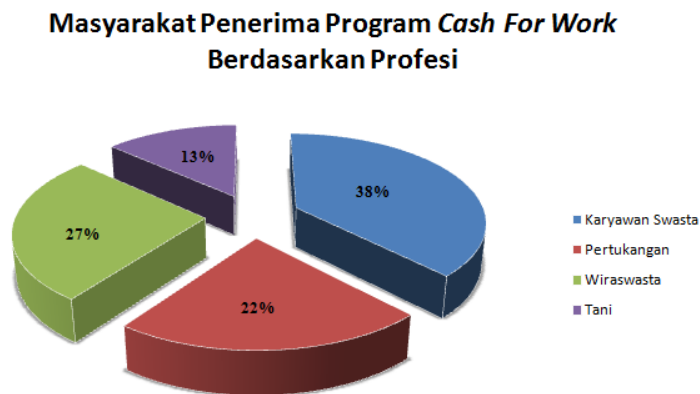
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menilai bahwa program *cash for work* yang dilaksanakan di Kelurahan Kebonsari Wetan pada

indikator ketepatan sasaran dapat dinilai efektif dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan dan sudah tepat pada masyarakat penerima program yang sesuai dengan kriteria. Sasaran kongkrit dari program *cash for work* adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terdampak pandemi *covid-19*. Dalam pendaftaran calon tenaga kerja tatau anggota KSM terdapat 90 orang pendaftar dari masyarakat wilayah Kelurahan Kebonsari Wetan dengan melakukan kegiatan administrasi, namun LKM Mandala hanya merekrut sebagian masyarakat karena terbatasnya anggaran dari pemerintah sehingga tidak semua masyarakat dapat menerima program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan.

Ketepatan sasaran yang lain dalam hal ini adalah pelaksanaan kegiatan mengedepankan prioritas yang dibutuhkan masyarakat dalam kegiatan perbaikan infrastruktur. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam program CFW adalah 45 warga dengan status MBR yang berdomisili di Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo mereka yang berprofesi sebagai supir, pekerja pabrik, tukang dan perempuan sebagai tulang punggung keluarga dimana pelaksanaan kegiatan perbaikan atau pemeliharaan infrastruktur ringan disesuaikan. Sasaran tersebut telah sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 177/KPTS/M/2021 serta buku pedoman prosedur operasional standar (POS) penyelenggaraan kegiatan *cash for work* (CFW) tahun 2021 berdasarkan Direktorat Cipta Karya. Berikut data masyarakat penerima program CFW di Kelurahan Kebonsari Wetan:

**Gambar 10**

**Diagram masyarakat penerima program cash for work**



Sumber : Kelurahan Kebonsari Wetan (diolah penulis),2022

Dapat dilihat dari diagram diatas penerima program CFW di Kelurahan Kebonsari Wetan mengacu pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mengalami PHK, pengurangan jam kerja maupun pemutusan kontrak kerja. MBR dari profesi sebagai karyawan swasta sebanyak 38% banyak terserap dalam program ini, sebab kebanyakan masyarakat Kelurahan Kebonsari Wetan berprofesi karyawan swasta.

Sedangkan Jika dilihat berdasarkan kaca mata prinsip mitigasi, maka pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan sudah sesuai dengan salah satu prinsip mitigasi yaitu prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan, kelompok rentan yang dimaksud adalah masyarakat berpenghasilan rendah yakni para pekerja yang bergantung pada penghasilan harian. Selain itu kaitannya dengan tepat sasaran yang dimaksud adalah pelaksanaan program mengedepankan prioritas yang dibutuhkan masyarakat dengan menerapkan prinsip efisien berarti

pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang maksimal untuk mencapai kualitas dan sasaran yang ditetapkan. Tidak ada proyek kegiatan infrastruktur yang belum dikerjakan tentu hal ini tidak luput dalam hal ketepatan sasaran pada anggaran biaya sehingga anggaran bantuan dari pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat.

Program *cash for work* merupakan upaya mitigasi pemerintah terhadap pandemi *covid-19* pada sektor ketenagakerjaan tentu harus mengandung upaya mitigasi yang memberikan dampak dan pengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat, bukan saja kepada penerima program melainkan juga terhadap lingkungan sekitar. Jika dilihat berdasarkan prinsip-prinsip upaya mitigasi yang dikemukakan oleh (Harjadi, 2007) dalam bukunya yang berjudul Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia maka pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan pada indikator ketepatan sasaran dapat dinilai sudah sesuai dengan prinsip mitigasi. Adapun penjelasan yang didapat dari hasil wawancara sebelumnya dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Prinsip upaya mitigasi bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Dalam pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan bila dilihat dari prinsip pertama ini maka dikatakan upaya mitigasi ini telah sesuai dengan prinsip yang mana sebelum program ini dilaksanakan, terdapat perencanaan yang matang mulai dari pembuatan RAB yang telah didasarkan pada biaya yang akan dikeluarkan hingga pihak

yang terlibat pada pelaksanaan program baik dari pemerintah, masyarakat dan pihak pemilik toko bahan material. Sehingga pada indikator ketepatan sasaran telah sesuai dengan prinsip upaya mitigasi bahwa dalam pelaksanaan program bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak.

- 2) Prinsip prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan. Terdapat hubungan antara ketepatan sasaran penerima program yang perlu didasari pada prioritas utama yakni masyarakat MBR yang menitikberatkan masyarakat lokal sebagai pekerja. 45 pekerja pada program kegiatan infrastruktur *cash for work* bisa dinilai bahwa penerima program adalah kelompok rentan dengan masyarakat MBR yang terdampak *covid-19* yang mengalami PHK, pemutusan kontrak kerja, dirumahkan dan sejenisnya. Dengan ketepatan pada kelompok rentan tersebut upaya mitigasi di Kelurahan Kebonsari Wetan pada program CFW berdampak positif kepada masyarakat sasaran.
- 3) Prinsip dibutuhkan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan jika dikaitkan dengan indikator ketepatan sasaran telah menerapkan prinsip upaya mitigasi tersebut dengan melihat tercapainya sasaran yang sebelumnya ditentukan hal ini tidak luput dari kegiatan evaluasi yang dilakukan pemerintah dan melakukan pengawasan serta pemantauan selama pelaksanaan program *cash for work* di lapangan untuk

mendorong percepatan perbaikan infrastruktur sesuai dengan sasaran perbaikan yang telah disepakati bersama masyarakat.

**c. Ketepatan Waktu**

Pelaksanaan dan pengerjaan yang dilakukan terhadap suatu program tentunya memiliki standar operasional kerja pada masing-masing kebijakan program untuk pedoman agar realisasi program dapat maksimal. Dalam pengukuran efektivitas menurut model efektivitas Sutrisno (dalam Wulandari 2018:16), salah satu variabel yang terdapat dalam penilaian efektivitas adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu yaitu waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Semakin tepat pada waktu saat pelaksanaan program maka semakin efektif program dapat terealisasi dan mampu menciptakan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berbicara perihal waktu pada penelitian ini adalah menilai apakah pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan tersebut sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau justru sebaliknya karena faktor lain yang kurang mendukung.

Berdasarkan pemaparan informan bahwa pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan tahun 2021 berdasarkan penilaian pada indikator ketepatan waktu yang diperkenalkan oleh Sutrisno (dalam Wulandari 2018:16) dapat dikatakan efektif, tidak ada satupun kegiatan yang pelaksanaannya melebihi batas waktu yang sudah direncanakan



sebelumnya mulai dari penggunaan waktu pada tahap persiapan, pelaksanaan hingga penyelesaiannya. Berikut dipaparkan ketetapan waktu dalam pelaksanaan program CFW di Kelurahan Kebonsari Wetan:

**Tabel 5**

***Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Perbaikan Infrastruktur***

<b>Ketetapan Waktu dari Kementerian PUPR</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Realisasi waktu</b>
10 Hari	Sosialisasi, penentuan prioritas perbaikan, survey teknis dan harga satua bahan material serta rancangan RAB	9 Hari
6 Hari	Verifikasi proposal, pencairan BPM ke rek BKM, Pencairan BPM dari rek BKM ke LKM	6 Hari
60 Hari	Pelaksanaan kegiatan perbaikan infrastruktur ringan pada kawasan pemukiman dan pemberdayaan masyarakat	50 Hari
	Pembuatan laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan CFW	10 Hari

*Sumber:* Kelurahan Kebonsari Wetan (diolah penulis), 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada pelaksanaannya dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR adalah 60 hari kerja mampu dilaksanakan pada kurun waktu 50 hari dengan berbagai kegiatan perbaikan pada 14 lokasi. Selain itu ketepatan waktu bagi pekerja juga efektif yaitu 6-7 jam kerja efektif. Program *cash for work* ini merupakan program dalam jangka pendek sehingga perlu dilaksanakan sesuai target waktu yang ditentukan. Semua target yang diberikan mampu

dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pekerja dalam program *cash for work* dengan tepat sesuai waktu yang direncanakan.

Hal lain bahwa faktor lain dalam ketepatan waktu adalah keadaan masyarakat yang juga berpengaruh terhadap kinerja para pekerja. Maksudnya adalah keberhasilan program dalam ketepatan waktu tergantung bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia karena merupakan sumber daya yang terpenting dalam keberhasilan pelaksanaan program agar dapat dikatakan efektif. Kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia pada masyarakat Kelurahan Kebonsari Wetan yang menjadi pekerja sudah dirasa cukup memumpuni pengetahuan yang diberikan oleh pihak terkait sehingga pelaksanaan program dapat terealisasi tepat pada waktu yang telah ditentukan. Kecakapan dari pelaksana pemerintah juga membuat program ini berjalan efektif.

Program *cash for work* merupakan upaya mitigasi pemerintah terhadap pandemi *covid-19* pada sektor ketenagakerjaan tentu harus mengandung upaya mitigasi yang memberikan dampak dan pengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat, bukan saja kepada penerima program melainkan juga terhadap lingkungan sekitar. Jika dilihat berdasarkan prinsip-prinsip upaya mitigasi yang dikemukakan oleh (Harjadi, 2007) dalam bukunya yang berjudul *Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia* maka pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan pada indikator ketepatan waktu dapat dinilai sudah sesuai dengan

prinsip mitigasi. Adapun penjelasan yang didapat dari hasil wawancara sebelumnya dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Prinsip upaya mitigasi bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak memiliki hubungan keterkaitan pada pelaksanaan program *cash for wok* di Kelurahan Kebonsari Wetan yang mana dalam menerapkan prinsip ini upaya yang dilakukan adalah sebelum dilaksanakan perbaikan infrastruktur, LKM Mandala beserta pekerja melaksanakan survey lokasi untuk melihat kerusakan perbaikan dan menentukan waktu untuk setiap kegiatan perbaikan sebagai acuan target waktu dalam pelaksanaannya sehingga pelaksanaan kegiatan dapat efektif. tindakan yang dilakukan dalam ketepatan waktu sudah sesuai dengan prinsip dengan melakukan perencanaan dalam segi hal waktu dan dalam penentuan waktu melibatkan pihak pekerja bukan saja atas dasar ketetapan LKM.
- 2) Prinsip prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan. Pada indikator ketepatan waktu berdasarkan prinsip kedua ini menyatakan bahwa hubungan dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan ringan infrastruktur melalui program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan berdasarkan telah menerapkan aturan waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dari hasil musyawarah antara masyarakat sebagai pekerja dengan LKM Mandala dengan mengikut sertakan

kelompok rentan yakni masyarakat kelompok MBR yang menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan program CFW.

- 3) Prinsip dibutuhkan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan dalam kegiatan program *cash for work* pada indikator ketepatan waktu telah sesuai dan diterapkan selama kegiatan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi pada setiap pelaksanaan kegiatan perbaikan infrastruktur melalui pendampingan untuk mendorong penyelesaian proyek disetiap pelaksanaan perbaikan proyek infrsaturuktur. Evaluasi dilakukan melalui rapat-rapat setelah proyek kegiatan perbaikan infrastruktur terselesaikan sesuai dengan aturan waktu yang telah ditentukan oleh dinas PUPR maupun oleh LKM mandala.

#### **d. Tercapainya Tujuan**

Dalam merencanakan sebuah program tentunya akan ditetapkan terlebih dahulu masing-masing tujuan dari dijalankannya program tersebut. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka pendek. Sebagaimana yang dimuat dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Kegiatan *Cash For Work* (CFW) Tahun 2021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, CFW dilaksanakan dengan tujuan :

1. Memberikan bantuan tunai dalam bentuk upah tenaga kerja kepada masyarakat terdampak *Covid-19* yang mengalami Putus Hubungan Kerja (PHK) dan masyarakat yang mengalami penurunan/kehilangan pendapatan;
2. Terpeliharanya aset infrastruktur melalui pemeliharaan dan perbaikan yang dibangun program KOTAKU maupun Program IBM lain melalui swakelola masyarakat (BKM/LKM).

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno (dalam Wulandari 2018:16) pada indikator tercapainya tujuan maka program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan sudah dirasa tepat pada pencapaian tujuan dan berjalan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai prosedur dari direktorat cipta karya PUPR. Tercapainya tujuan ini bukan saja dilihat dari hasil pelaksanaan namun juga dari sasaran dan waktu kegiatan rehabilitasi infrastruktur yang ditentukan sebelumnya.

Selain itu pencapaian tujuan yang lain yakni bahwa program CFW sesuai dengan prinsip mitigasi bencana yakni pelaksanaan mitigasi harus bersifat kompleks, saling ketergantungan satu komponen dengan yang lainnya serta melibatkan banyak pihak. Desakan terhadap upaya mitigasi tidak dapat berdiri sendiri, sangat diperlukan partisipasi semua komponen suatu wilayah dalam setiap pelaksanaannya. Program *cash for work* merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam mitigasi pandemi, dimana program ini bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Pihak yang

terlibat diantaranya adalah pihak kelurahan dan masyarakat serta pihak swasta yang menjadi kerjasama dalam supplier atau toko bahan material selama kegiatan pelaksanaan program. Upaya mitigasi melalui program CFW ini bersifat kompleks dalam artian terdapat prosedur dan aturan-aturan yang didalamnya perlu dilaksanakan dengan benar agar upaya mitigasi pada bencana non alam ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pelaksanaan program mitigasi pada sektor ketenagakerjaan dengan skema *cash for fork* di Kelurahan Kebonsari Wetan ini cukup positif dan terealisasi dengan baik dibuktikan dengan adanya penyerapan tenaga kerja menambah pendapatan masyarakat, serta mempermudah kegiatan sosial ekonomi masyarakat melalui perbaikan ringan dalam menanggulangi masalah pada kawasan permukiman pada aset infrastruktur KOTAKU. Sejauh ini tujuan yang diharapkan pemerintah pun dapat dikatakan optimal dan tercapai sesuai tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Program *cash for work* merupakan upaya mitigasi pemerintah terhadap pandemi *covid-19* pada sektor ketenagakerjaan tentu harus mengandung upaya mitigasi yang memberikan dampak dan pengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat, bukan saja kepada penerima program melainkan juga terhadap lingkungan sekitar. Jika dilihat berdasarkan prinsip-prinsip upaya mitigasi yang dikemukakan oleh (Harjadi, 2007) dalam bukunya yang berjudul *Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia* maka pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari

Wetan pada indikator tercapainya tujuan dapat dinilai sudah sesuai dengan prinsip mitigasi. Adapun penjelasan yang didapat dari hasil wawancara sebelumnya dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Prinsip upaya mitigasi bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak jika dikaitkan dengan indikator tercapainya tujuan maka dinilai telah sesuai dengan prinsip pertama ini. Tujuan yang hendak dicapai telah tercapai melalui keterlibatan masyarakat, pemerintah dan swasta sehingga tujuan baik dari segi ekonomi maupun lingkungan memberikan manfaat dan dampak yang positif. Pencapaian tujuan tersebut merupakan hasil upaya pemerintah Kelurahan Kebonsari Wetan dan LKM Mandala dengan melalui pengawasan baik dalam hal perbaikan infrastruktur maupun prosedur dalam anggaran yang dikeluarkan untuk mendorong pencapaian program yang maksimal. Sehingga tujuan dari kegiatan program *cash for work* sudah terealisasi di kelurahan Kebonsari Wetan
- 2) Prinsip prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan. Berdasarkan prinsip kedua ini menyatakan bahwa keterkaitannya dengan pencapaian tujuan dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan ringan infrastruktur melalui program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan yang mana membantu masyarakat MBR yang terdampak pandemi *covid-19* dan juga memelihara aset program KOTAKU. Pencapaian tujuan ini

tidak lain dilakukan melalui proses pemantauan dan pengawasan serta pendampingan pada setiap kegiatan pelaksanaan program di lapangan. Termasuk mendorong pencapaian tujuan pada kelompok rentan penerima program.

- 3) Prinsip dibutuhkan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan dalam kegiatan program *cash for work* pada indikator tercapainya tujuan telah sesuai dan diterapkan selama kegiatan dengan melakukan pemantauan melalui pengawasan dan pendampingan dalam kegiatan agar segala proyek perbaikan infrastruktur berjalan sesuai dengan tujuan yang sebelumnya telah ditentukan. Selain itu evaluasi juga dilaksanakan dalam setiap penyelesaian proyek kegiatan perbaikan infrastruktur bersama anggota KSM beserta ketua pelaksana, LKM Mandala dan pihak Kelurahan Kebonsari Wetan untuk mengetahui hasil dari perbaikan ringan infrastruktur selama di lapangan.

#### **e. Perubahan Nyata**

Pada sebuah program perubahan nyata adalah salah satu ukuran untuk menilai berhasil tidaknya suatu program yang dijalankan. Jika program berhasil dijalankan dengan adanya perubahan maka program tersebut bisa dikatakan berjalan efektif namun sebaliknya jika tidak ada perubahan setelah adanya program maka dapat dikatakan program tersebut tidak efektif. Perubahan nyata yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu melihat sejauh mana program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan dari



adanya program ini ada dapat memberikan dampak perubahan positif bagi agen pelaksana dan lingkungan. Di dalam indikator kelima ini, ada dua poin penilaian sebagai pendukung untuk menilai efektivitas program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan pada indikator perubahan nyata yaitu program *cash for work* memberikan dampak perubahan nyata kepada masyarakat baik penerima program maupun bukan penerima program dan proses pemeliharaan berkelanjutan terhadap proyek yang telah dikerjakan.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan menilai bahwa pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan pada indikator perubahan nyata ditinjau dari ukuran efektivitas menurut Sutrisno (dalam Wulandari, 2018:16) belum dapat dikatakan efektif dari segi dampak dan pemeliharaan berkelanjutan. Dimensi atas perubahan nyata dampak pelaksanaan program *cash for work* dapat membantu secara ekonomi, terlihat secara langsung sebagai contoh pada saat pekerja penerima manfaat program CFW menerima upah langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jika dilihat dari segi ekonominya memang tepat, karena dapat membantu dan meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah terutama masyarakat yang terdampak pandemi *covid-19*. Namun kurang efektif dalam memberikan manfaat yang berkelanjutan terhadap perekonomian masyarakat Kelurahan Kebonsari Wetan karena jeda waktu yang tidak tentu kapan akan ada lagi program *cash for work* ini. Dampak perubahan nyata yang dirasa oleh masyarakat penerima program saat sekarang ini belum begitu dirasakan. Program ini

belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara permanen karena sifat kegiatannya yang temporer sedangkan kebutuhan masyarakat ada setiap hari, setelah selesainya kegiatan tenaga kerja yang diserap tadi hanya sementara memiliki pekerjaan, karena jika kegiatan *cash for work* selesai, maka para tenaga kerja kembali menganggur dan ini merupakan hal yang kurang efektif dari segi pemberdayaan masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja. artinya tenaga kerja yang pengangguran diberdayakan yaitu hanya pada saat kegiatan program *cash for work* ini berjalan.

Dalam aspek pengawasan pasca kegiatan berdasarkan hasil wawancara telah melaksanakan pengawasan dengan melakukan pengecekan kondisi bangunan yang telah diperbaiki, jika ada kerusakan masih dalam kurun waktu 6 bulan maka pelaksanaan perbaikan tersebut masih menjadi tanggung jawab Kelurahan dan LKM Mandala, namun setelah lebih dari 6 bulan sudah menjadi tanggung jawab Kelompok Pengawas Dalam Program (KPP) dari Dinas Pekerjaan Umum. Fakta dilapangan menemukan bahwa pihak LKM Mandala maupun Kelurahan belum melaksanakan pengawasan secara efektif dapat dilihat dari masih ditemukan saluran drainase yang keadaannya sudah mulai menurun kualitasnya. Hal ini terjadi tentunya dikarenakan kurangnya perawatan yang dilakukan oleh masyarakat dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak LKM Mandala maupun Kelurahan Kebonsari Wetan.

Hal ini tentu berbanding terbalik dengan prinsip mitigasi bahwa dalam pelaksanaan suatu mitigasi bencana dibutuhkan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan namun dari hasil penelitian bahwa upaya mitigasi melalui program *cash for work* belum melaksanakan prinsip mitigasi secara berkelanjutan. Belum adanya kegiatan evaluasi resmi, pemantauan atau jadwal khusus dari pemerintah pada kegiatan infrastruktur ringan baik dari Kelurahan Kebonsari Wetan maupun dari Dinas PUPR itu sendiri. Bahkan hasil wawancara menyatakan audit dilakukan kurang lebih 3 tahun sekali setelah adanya program.

Program *cash for work* merupakan upaya mitigasi pemerintah terhadap pandemi *covid-19* pada sektor ketenagakerjaan tentu harus mengandung upaya mitigasi yang memberikan dampak dan pengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat, bukan saja kepada penerima program melainkan juga terhadap lingkungan sekitar. Jika dilihat berdasarkan prinsip-prinsip upaya mitigasi yang dikemukakan oleh (Harjadi, 2007) dalam bukunya yang berjudul Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia maka pelaksanaan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan pada indikator perubahan nyata dapat dinilai bahwa prinsip upaya mitigasi belum sepenuhnya dilaksanakan. Adapun penjelasan yang didapat dari hasil wawancara sebelumnya dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Prinsip upaya mitigasi bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak jika dihubungkan dengan indikator perubahan nyata dinilai telah sesuai dengan prinsip pertama ini bahwa

pelaksanaan program CFW di Kelurahan Kebonsari Wetan melibatkan berbagai pihak mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan perbaikan infrastruktur dengan melibatkan masyarakat dan pihak swasta yakni pemilik toko supliyer dalam melakukan kerjasama. Dampak yang dirasakan yaitu bisa membentuk kerjasama yang baik antara instansi dan lembaga dengan masyarakat beserta pemilik toko. Selain itu dampak perubahan nyata yang dirasakan yakni bagi penerima program dapat membantu masyarakat dalam pemberian upah tambahan selama kegiatan dan perubahan nyata yang dapat dilihat dari lingkungan yakni bisa mengatasi masalah kekumuhan.

- 2) Prinsip prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan. Berdasarkan prinsip kedua ini menyatakan bahwa keterkaitannya dengan pencapaian tujuan dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan ringan infrastruktur melalui program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan pada kelompok rentan yakni dengan adanya program CFW masyarakat MBR merasa terbantu dapat dilihat dari perubahan nyata penerima program dapat membantu perekonomian masyarakat serta bagi bukan penerima program bisa merasakan perubahan lewat perbaikan infrastruktur yang dikerjakan, walaupun belum sepenuhnya upah yang diterima belum dapat mensejahterakan masyarakat. perubahan nyata dari segi ekonomi pada penerima program

belum bisa dirasakan memberikan perubahan secara berkelanjutan. Dampak dari segi ekonomi adanya program ini dirasakan sementara karena program yang tidak berkelanjutan. jika proyek perbaikan infrastruktur sudah selesai maka masyarakat sebagai pekerja tidak dapat lagi melaksanakan pekerjaannya dan menerima upahnya.

- 3) Prinsip dibutuhkan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan dalam kegiatan program *cash for work* pada indikator perubahan nyata belum dilakukan sepenuhnya, pada pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pengawasan dan pendampingan serta evaluasi melalui rapat-rapat setelah proyek dilaksanakan, namun pada kegiatan program *cash for work* belum dilaksanakan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan dalam proses pemeliharaan infrastruktur di lingkungan kelurahan Kebonsari Wetan baik pemerintah kelurahan maupun dinas PUPR.

Berdasarkan analisis dan interpretasi data pada capaian efektivitas program *cash for work* (CFW) di Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo maka hasil temuan dilapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program *cash for work* dinilai telah efektif dan dapat diterima di lingkungan masyarakat pada indikator pemahaman program yang mana bentuk pemahaman program yang dilakukan oleh pihak kelurahan kepada masyarakat yaitu melalui

kegiatan sosialisasi dan pelatihan pertukangan secara optimal dan maksimal sebelum pelaksanaan program CFW di realisasikan di lapangan.

Pada indikator ketepatan sasaran berdasarkan penilaian subyektif dinilai efektif dan sudah sesuai dengan target sasaran serta sesuai dengan prinsip mitigasi bencana yakni prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan, kelompok rentan yang dimaksud pada program *cash for work* adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), pemutusan kontrak kerja, dirumahkan dan pengurangan jam kerja.

Pada indikator ketepatan waktu dinilai telah efektif dapat dilihat bahwa tidak ada satupun kegiatan yang pelaksanaannya melebihi batas waktu yang sudah direncanakan sebelumnya mulai dari penggunaan waktu pada tahap persiapan, pelaksanaan hingga penyelesaiannya. Pada pelaksanaannya dengan jangka waktu yang ditetapkan adalah 60 hari kerja mampu dilaksanakan pada kurun waktu 50 hari dengan berbagai kegiatan perbaikan pada 14 lokasi. Selain itu ketepatan waktu bagi pekerja juga efektif yaitu 6-7 jam kerja efektif.

Pada indikator tercapainya tujuan sudah dirasa tepat pada pencapaian tujuan dan berjalan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, baik tercapainya hasil pelaksanaan maupun sasaran dan waktu kegiatan rehabilitasi infrastruktur yang ditentukan sebelumnya. Selain itu program CFW sesuai dengan prinsip mitigasi bencana yaitu pelaksanaan mitigasi harus bersifat kompleks serta melibatkan banyak pihak. Pihak yang terlibat diantaranya adalah

pihak kelurahan dan masyarakat serta pihak swasta yang menjadi kerjasama dalam supplier atau toko bahan material selama kegiatan pelaksanaan program.

Pada indikator perubahan nyata dinilai kurang efektif dalam memberikan manfaat yang berkelanjutan terhadap perekonomian masyarakat karena jeda waktu yang tidak tentu kapan akan ada lagi program *cash for work* ini. Program ini belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara permanen karena sifat kegiatannya yang sementara sedangkan kebutuhan masyarakat ada setiap hari, setelah selesainya kegiatan maka para tenaga kerja kembali menganggur. Selain itu pelaksanaan program *cash for work* tidak sesuai dengan prinsip mitigasi yakni dibutuhkan evaluasi dan pemantauan berkelanjutan, sebab dalam aspek pengawasan pasca kegiatan Belum adanya kegiatan evaluasi resmi, pemantauan atau jadwal khusus dari pemerintah pada kegiatan infrastruktur ringan baik dari Kelurahan Kebonsari Wetan maupun dari Dinas PUPR itu sendiri. Bahkan hasil wawancara menyatakan audit di lakukan kurang lebih 3 tahun sekali setelah adanya program.

**D. Kerangka Hasil Penelitian**

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 177/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2021.

Teori efektivitas program program dikemukakan oleh Sutrisno (dalam Wulandari,2018:16) terdiri atas indikator:

- a. Pemahaman Program
- b. Ketepatan Sasaran
- c. Ketepatan Waktu
- d. Tercapainya Tujuan
- e. Perubahan Nyata

Prinsip-prinsip Mitigasi Bencana Menurut Harjadi (2007):

- 1. Upaya mitigasi bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak
- 2. Prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan
- 3. Dibutuhkan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan

**Pemahaman Program**

- 1 Program CFW ditinjau dalam indikator pemahaman program telah sesuai dengan prinsip mitigasi yang bersifat kompleks dan melibatkan berbagai pihak
- 2 Pelaksanaan program CFW pada pemahaman program telah memprioritaskan kelompok rentan sesuai prinsip mitigasi.
- 3 Program CFW ditinjau dari pemahaman program belum sepenuhnya bisa dinyatakan sesuai dengan prinsip evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan.

**Ketepatan Sasaran**

- 1. Pelaksanaan program CFW dalam kegiatan infrastruktur dilihat pada indikator ketepatan sasaran telah sesuai dengan prinsip mitigasi yang bersifat kompleks dan melibatkan berbagai pihak
- 2. Penerima program CFW sudah tepat sasaran sesuai dengan prinsip mitigasi yakni prioritas utama dalam mitigasi adalah kelompok rentan
- 3. Pelaksanaan program CFW dalam indikator ketepatan sasaran sudah menerapkan prinsip evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan selama kegiatan.

**Ketepatan Waktu**

- 1 Kegiatan pelaksanaan program CFW pada indikator ketepatan waktu telah sesuai dengan prinsip mitigasi yang bersifat kompleks dan melibatkan berbagai pihak
- 2 Pelaksanaan program CFW pada perbaikan infrastruktur dalam ketepatan waktu sudah sesuai prinsip mitigasi dengan mengikut sertakan masyarakat dalam penentuan waktu kegiatan.
- 3 Dalam pelaksanaan program CFW pada ketepatan waktu sudah menerapkan prinsip evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan sesuai waktu yang ditentukan.

**Tercapainya Tujuan**

- 1. Program CFW telah mencapai tujuan sesuai dengan prinsip mitigasi dengan melibatkan berbagai pihak
- 2. Tercapainya tujuan pada pelaksanaan program CFW yakni dengan memprioritaskan kelompok rentan sebagai penerima program sesuai prinsip mitigasi
- 3. Pelaksanaan program CFW telah menerapkan prinsip mitigasi dengan melakukan evaluasi dan pemantauan selama kegiatan.

**Perubahan Nyata**

- 1 Pelaksanaan program CFW dalam perubahan nyata sudah sesuai dengan prinsip mitigasi yang melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan mulai dari tahap perencanaan- pelaksanaan
- 2 Program CFW pada indikator tercapainya tujuan telah sesuai dengan prinsip mitigasi, penerima program adalah kelompok rentan, yakni MBR
- 3 Pelaksanaan program CFW belum melaksanakan prinsip mitigasi evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan pasca kegiatan.

Capaian Efektivitas Program *Cash For Work* Di Kelurahan Kebonsari Wetan menunjukkan bahwa dalam indikator pemahaman program sudah dinilai efektif, ketepatan sasaran sudah sesuai penerima program dan prioritas kebutuhan masyarakat, ketepatan waktu dinilai efektif, tercapainya tujuan sudah di rasa tercapai segala tujuan sesuai yang ditentukan sebelumnya, perubahan nyata dirasa kurang efektif karena program ini hanya bersifat sementara. Program CFW yang dilaksanakan di Kelurahan Kebonsari Wetan telah memenuhi beberapa prinsip yakni perlibatan berbagai pihak, prioritas utama adalah kelompok rentan sedangkan prinsip dibutuhkan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan belum sepenuhnya dilaksanakan.



